



**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN UPAH MINIMUM
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2015-2024**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*

Oleh:

ZAHRATUL ZAHWA
NIM. 2130402115

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
1447H/2025M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahratul Zahwa

NIM : 2130402115

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2024”** merupakan karya saya sendiri, tidak mengandung unsur plagiat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Batusangkar, 27 Agustus 2025
Saya yang Menyatakan,



Zahratul Zahwa
NIM. 2130402115

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Zahratul Zahwa**, NIM. 2130402115 dengan judul "**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Upah Minimum (UMP), dan Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2024**" Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasah*.

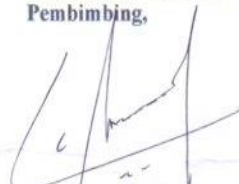
Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Dr. Novia Nengsih, M.A.Ek
NIP.19901104201932008

Batusangkar, Juli 2025
Pembimbing,


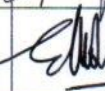



Elfadhli, SE.L., M. Si
NIP. 19820617200710 1 002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Zahratul Zahwa NIM.2130402115** dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2024 ”** telah diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 dinyatakan telah lulus dan dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh Sarjana Ekonomi (S.E) gelar sarjana dalam program studi Ekonomi Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Elfadhli, SE.I., M.Si. NIP. 198206172007101002	Ketua Sidang/ Pembimbing		27/8/25
2.	Elmilyani Wahyuni, M.E.Sy NIP. 198803302018012002	Penguji I/ Anggota		25/8/2025
3.	Dr.Novia Nengsih, M.A.Ek NIP.199011042019032008	Penguji II/ Anggota		25/8/25

Batusangkar, Agustus 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus
Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

Zahratul Zahwa, NIM 2130402115. Judul Skripsi: "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2024". Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah fluktuatif kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2015–2024. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan namun kesejahteraan masyarakat meningkat, bertentangan dengan asumsi bahwa kenaikan kesejahteraan masyarakat seharusnya diikuti oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi. Pada upah minimum, upah minimum naik tetapi kesejahteraan menurun, yang mana bertentangan dengan asumsi bahwa penurunan kesejahteraan masyarakat seharusnya diikuti oleh penurunan upah minimum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2024.

Penelitian ini menggunakan penelitian metode *Scrapping Data* yang bersifat kuantitatif dengan data sekunder dari periode 2015-2024. Data dikumpulkan melalui situs resmi BPS Sumatera Barat, yang menyediakan informasi yang diolah sebelumnya dan dapat digunakan untuk melengkapi analisis dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (X1) tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan variabel upah minimum (X2) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Y). Dan secara simultan, pertumbuhan ekonomi (X1) dan upah minimum (X2) bersama-sama mempengaruhi variabel kesejahteraan masyarakat (Y) sebesar 79% dan 21% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Kesejahteraan Masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Dan Luaran Penelitian	10
G. Definisi Operasional	10
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Landasan Teori	13
1. Kesejahteraan.....	13
2. Pertumbuhan Ekonomi	23
3. Upah Minimum.....	31
4. Keterkaitan Antar Variabel	37
B. Penelitian Relevan	40
C. Kerangka Berfikir	44
D. Hipotesis	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Tempat Penelitian.....	46
C. Sumber Data	47

D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Teknik Analisis Data	48
1. Uji Asumsi Klasik.....	48
2. Analisis Regresi Linier Berganda	49
3. Estimasi Model Regresi Data Panel.....	50
4. Pemilihan Model Regresi Data Panel	51
5. Uji Hipotesis	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Temuan Penelitian	55
1. Luas dan Batas Administrasi	55
2. Batas Administrasi	57
B. Deskripsi Data Penelitian	57
C. Analisis Data.....	59
1. Analisis Regresi Data Panel.....	59
2. Pemilihan Model Regresi Data Panel	62
3. Uji Asumsi Klasik.....	64
4. Hasil Estimasi Regresi Data Panel.....	65
5. Pengujian Hipotesis	66
D. Pembahasan	69
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, dan.....	4
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	46
Tabel 4. 1 Luas Wilayah Menurut Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	56
Tabel 4. 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	58
Tabel 4. 3 Hasil Regresi Data Panel <i>Common Effect Model</i> (CEM)	60
Tabel 4. 4 Hasil Regresi Data Panel <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	61
Tabel 4. 5 Hasil Regresi Data Panel <i>Random Effect Model</i> (REM)	62
Tabel 4. 6 Hasil Uji Chow	63
Tabel 4. 7 Uji Hausman	63
Tabel 4. 8 Hasil Uji Langrange Multiplier.....	64
Tabel 4. 9 Hasil Regresi Data Panel <i>Random Effect Model</i> (REM)	65
Tabel 4. 10 Hasil Uji Parsial (Uji T).....	67
Tabel 4. 11 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	68
Tabel 4. 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (<i>R-Squared</i>).....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	44
Gambar 4. 1 Peta Provinsi Sumatera Barat.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan pemerintah dalam proses pembangunan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan sosial ekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terwujud melalui upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui perkembangan pertumbuhan ekonomi yang juga dipengaruhi oleh teknologi dan pengetahuan, bukan hanya oleh faktor fisik. (Kemenko PMK, 2024).

Dalam ekonomi, kajian mengenai konsep kesejahteraan menempati posisi yang sangat penting (Assidiq, 2017)). Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi serta meratanya distribusi pendapatan. Menurut Sita (2017), untuk menentukan apakah suatu individu atau kelompok masyarakat sudah berada di tahap sejahtera dapat dilihat dari kondisi kesehatan yang baik, perekonomian yang meningkat, tingkat pendidikan yang tinggi, serta kualitas hidup yang mencapai taraf layak. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat juga merupakan bagian dari salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menandakan keberhasilan pemerintah dalam membangun perekonomian negaranya.

Selanjutnya, perekonomian suatu negara akan senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena adanya kegiatan ekonomi yang terus berjalan dan diupayakan agar meningkat di periode selanjutnya. Keberhasilan negara dalam mengelola sumber dayanya dapat dilihat dari besar kecilnya pendapatan yang diperoleh, salah satunya melalui laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahunnya. Dengan demikian, pendapatan suatu negara juga akan menunjukkan bagaimana kondisi serta tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut (Yuni, 2021). Sejalan dengan itu, Sadono Sukirno

(2010) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang membuat barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat mengalami penambahan sehingga menyebabkan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Adapun, terdapat beberapa teori yang mengaitkan pertumbuhan ekonomi dan upah minimum kesejahteraan masyarakat. Teori tersebut antara lain adalah teori pertumbuhan ekonomi klasik, teori ekonomi kesejahteraan (economics welfare), dan teori pendapatan absolut vs. relatif. Menurut Adam Smith dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik, kesejahteraan masyarakat akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Dengan adanya akumulasi modal, peningkatan kreativitas, dan perdagangan bebas maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Peningkatan output akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat (Liana, 2024).

Selanjutnya, teori kesejahteraan menurut Arthur C. Pigou (1920) menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat meningkat apabila pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan. Kesejahteraan masyarakat seringkali dikaitkan dengan kenaikan pendapatan nasional yang berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi (Pigou, 1920). Sedangkan menurut John Maynard Keynes dan James S. Duesenberry dalam teori pendapatan absolut vs. relatif, upah minimum yang lebih tinggi dapat meningkatkan pendapatan absolut pekerja dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan. Selain itu, peningkatan pendapatan relatif terhadap standar hidup atau pendapatan rata-rata juga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. (Keynes, 1936)

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, UNDP (*United Nations Development Programme*) telah menerbitkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM digunakan untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara melalui tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak (BPS, 2017). Oleh karena itu,

penelitian ini menggunakan data IPM untuk melihat sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, IPM juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah. Apabila faktor-faktor tersebut meningkat, maka nilai IPM juga akan meningkat yang menandakan keberhasilan pembangunan suatu negara.

Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia saling berkontribusi satu sama lain. UNDP menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendukung pembangunan manusia secara berkelanjutan. Meskipun keduanya tidak memiliki hubungan otomatis, namun keduanya dapat saling mendorong apabila digabungkan dalam satu kebijakan pembangunan yang konsisten. Indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi negara antara lain adalah PDB, pendapatan per kapita, struktur ekonomi, urbanisasi, serta indeks kualitas hidup (Muafiqie, 2023) . PDB mengukur total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, sedangkan PDRB mengukur total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah (provinsi/kabupaten/kota). PDRB didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode tertentu di wilayah tertentu (Kartasasmita, 2024).

Di samping pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat juga dipengaruhi oleh upah. Tingkat upah menentukan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan gubernur. Penetapan upah minimum di tingkat provinsi disebut Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi tersebut (Sastrohadiwiryono, 2021) Kebijakan UMP berperan penting dalam masalah ketenagakerjaan di negara berkembang maupun negara maju. Tujuannya adalah agar pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum bersama keluarganya. Dengan demikian, upah minimum harus ditetapkan untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja. Semakin tinggi

upah minimum, semakin tinggi pula insentif, kepuasan, dan kesejahteraan pekerja (Mudana, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pertumbuhan ekonomi dan kebijakan upah minimum. Oleh sebab itu, penelitian ini difokuskan pada pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan fokus di 3 kabupaten dan kota yaitu Kota Padang, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Tanah Datar.

Pada tabel 1.1 dibawah ini adalah data pertumbuhan ekonomi (PDRB), data upah minimum provinsi (UMP), dan data kesejahteraan manusia (IPM) di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2024.

Tabel 1. 1
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Upah Minimum (Upah Minimum Provinsi), dan Kesejahteraan Masyarakat (IPM) di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2024

Tahun	Dae rah	PDRB (%)	Upah (Juta Rp)	IPM (%)
2015	Kota Padang	6,41	1.615.000	80,36
2016	Kota Padang	6,22	1.800.725	81,06
2017	Kota Padang	6,23	1.949.284	81,58
2018	Kota Padang	6,06	2.119.067	82,25
2019	Kota Padang	5,64	2.289.220	82,68
2020	Kota Padang	-1,86	2.484.041	82,82
2021	Kota Padang	3,65	2.484.041	82,9
2022	Kota Padang	4,31	2.512.539	83,29
2023	Kota Padang	4,54	2.742.476	83,98
2024	Kota Padang	4,65	2.811.449	83,99
2015	Kab. 50 Kota	5,61	1.615.000	67,65
2016	Kab. 50 Kota	5,32	1.800.725	68,37
2017	Kab. 50 Kota	5,34	1.949.284	68,89
2018	Kab. 50 Kota	5,23	2.119.067	69,17
2019	Kab. 50 Kota	5,06	2.289.220	69,67
2020	Kab. 50 Kota	-1,16	2.484.041	70,82
2021	Kab. 50 Kota	3,33	2.484.041	71,03
2022	Kab. 50 Kota	4,02	2.512.539	71,64
2023	Kab. 50 Kota	4,55	2.742.476	72,05
2024	Kab. 50 Kota	4,03	2.811.449	71,14
2015	Kab. Tanah Datar	5,33	1.615.000	69,49
2016	Kab. Tanah Datar	5,03	1.800.725	70,11
2017	Kab. Tanah Datar	5,12	1.949.284	70,37
2018	Kab. Tanah Datar	5,04	2.119.067	71,25
2019	Kab. Tanah Datar	4,99	2.289.220	72,14
2020	Kab. Tanah Datar	-1,12	2.484.041	74,01
2021	Kab. Tanah Datar	3,27	2.484.041	74,14
2022	Kab. Tanah Datar	4,16	2.512.539	74,87
2023	Kab. Tanah Datar	4,44	2.742.476	75,57
2024	Kab. Tanah Datar	3,85	2.811.449	74,9

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Sumatera Barat

Dalam penelitian ini, penulis tidak mengambil seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, melainkan penulis membatasi objek kajian pada tiga daerah di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan data PDRB, upah minimum, dan IPM di Kota Padang, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Tanah Datar tahun 2015–2024, dapat terlihat beberapa permasalahan. Pertama, dari sisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi di ketiga daerah tersebut cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 bahkan mengalami kontraksi cukup tajam, misalnya di Kota Padang mencapai -1,56 persen, di Kabupaten Lima Puluh Kota -1,16 persen, dan di Kabupaten Tanah Datar -1,12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum stabil, sehingga sulit memberikan pengaruh konsisten terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kedua, dari sisi upah minimum, data menunjukkan adanya kenaikan dari tahun ke tahun. Misalnya di Kota Padang dari Rp1,6 juta pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp2,8 juta pada tahun 2024. Namun, kenaikan upah ini tidak selalu diikuti dengan peningkatan IPM yang signifikan. Dengan kata lain, meskipun upah nominal naik, daya beli riil masyarakat kemungkinan belum meningkat secara proporsional akibat adanya inflasi dan disparitas produktivitas tenaga kerja. Selain itu, terdapat perbedaan tingkat upah antar daerah yang cukup besar, tetapi kesenjangan tersebut tidak serta-merta tercermin dalam perbedaan IPM.

Ketiga, dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ketiga daerah mengalami kenaikan yang relatif lambat. Misalnya Kota Padang hanya naik dari 80,36 persen di tahun 2015 menjadi 83,99 persen di tahun 2024, sedangkan Kabupaten Tanah Datar dari 70,11 persen menjadi 74,09 persen. Artinya, meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi dan kenaikan upah, perbaikan kualitas hidup masyarakat berjalan cukup lambat. Hal ini mengindikasikan bahwa IPM tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan

ekonomi dan upah, tetapi juga faktor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan.

Pemilihan ketiga daerah tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan. Kota Padang merupakan ibu kota provinsi sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) relatif tinggi dibandingkan daerah lain, sehingga dapat merepresentasikan karakteristik wilayah perkotaan dengan aktivitas ekonomi yang dinamis.

Sementara itu, Kabupaten Lima Puluh Kota dipilih karena memiliki struktur ekonomi yang berbeda, yaitu dominan pada sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini memberikan perspektif bagaimana variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum memengaruhi kesejahteraan masyarakat di wilayah dengan basis agraris (Adella, 2024).

Selanjutnya, Kabupaten Tanah Datar dipilih karena dikenal memiliki perkembangan sosial-ekonomi yang relatif stabil, dengan karakter budaya dan pendidikan yang cukup kuat. Daerah ini memberikan variasi pembandingan yang penting untuk melihat keterkaitan antar variabel penelitian.

Dengan demikian, ketiga daerah tersebut dipandang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

Permasalahan penelitian mengenai kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir dapat dilihat dari masih adanya ketimpangan ekonomi. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir terlihat adanya pertumbuhan, namun kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan tetap cukup signifikan. Sebagai contoh, Kota Padang selaku ibu kota provinsi mengalami pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih cepat, sedangkan daerah-daerah lain seperti Kabupaten Pesisir Selatan maupun wilayah pedalaman masih tertinggal dalam akses infrastruktur, pendidikan, dan lapangan pekerjaan (Todaro & Smith, 2011; BPS Sumatera Barat, 2023).

Selain itu, upah minimum provinsi (UMP) yang tidak memadai juga menjadi persoalan penting. Walaupun UMP di Provinsi Sumatera Barat telah mengalami peningkatan, kenaikan yang berlangsung tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan hidup masyarakat yang semakin tinggi. Lebih lanjut, kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok yang semakin melonjak sering kali tidak sebanding dengan kenaikan upah yang ditetapkan. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, terutama bagi pekerja dengan gaji atau upah di bawah minimum (Sukirno, 2016; Suryana, 2013).

Permasalahan tersebut semakin diperkuat dengan adanya Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-827 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, yang menimbang pada poin a: Bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja yang merupakan bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi barang dan jasa. Keputusan tersebut juga menetapkan bahwa perusahaan dilarang membayar upah di bawah upah minimum pada tahun itu (Gubernur, 2020). Namun demikian, masih menjadi permasalahan bahwa masyarakat merasa kekurangan atas nominal yang telah ditetapkan. Upah yang diberikan dianggap oleh sebagian besar masyarakat masih rendah dan tidak mampu menutupi kebutuhan yang terus berjalan, apalagi dengan harga-harga barang yang semakin hari semakin mengalami peningkatan (Suryahadi, 2012).

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana variabel yang ada saling memengaruhi atau tidak, serta untuk mencari dan menemukan solusi atas permasalahan yang muncul. Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi pihak-pihak tertentu dalam mengambil langkah maupun kebijakan yang tepat apabila menghadapi isu serupa di masa mendatang.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang sedang dibahas memerlukan penelitian berlanjut

mengenai mengapa dan bagaimana setiap variabel yang ada saling mempengaruhi satu sama lain. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan, upah minimum yang mempengaruhi seberapa besar kesejahteraan masyarakat dan bagaimana mereka saling terkait. Dengan demikian, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2024**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka permasalahan penelitian dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. PM (Indeks Pembangunan Manusia) meningkat, sementara PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) mengalami fluktuasi dan bahkan menurun pada tahun 2020.
2. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) meningkat, sementara upah minimum provinsi terus naik setiap tahun, namun peningkatan IPM relatif lambat.
3. Pertumbuhan ekonomi (PDRB) yang cenderung fluktuatif tidak selalu sejalan dengan peningkatan IPM di Kota Padang, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Tanah Datar.
4. Kenaikan upah tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan IPM, meskipun dari tahun ke tahun upah terus mengalami peningkatan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2025.
2. Pengaruh upah minimum terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2024.

3. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2024.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2024?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2024?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2024?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh upah minimum di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten /Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2024.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2024.

F. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi peneliti lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Bagi Penulis

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar S.E pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
- 2) Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai variabel-variabel yang di usung sebagai judul penelitian ini dan bagaimana variabel-variabel itu saling mempengaruhi.

2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian dari penelitian ini adalah dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

G. Definisi Operasional

Dalam upaya untuk menghindari kesalahpahaman mengenai judul penelitian yang telah penulis usulkan yaitu “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah minimum terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2024” maka penulis akan memberikan definisi tentang beberapa istilah yang akan sering ditemui di dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Kesejahteraan Masyarakat dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Pengertian yang umum tentang kesejahteraan adalah tercapainya kehidupan yang tentram, kehidupan yang aman baik secara lahiriah maupun kehidupan yang aman secara batiniah dengan terlepasnya seseorang tersebut dari lilitan keadaan miskin, perasaan takut serta kebodohan. (Sodiq, 2016)

Dikarenakan kesejahteraan sulit diukur dengan satu pengukur tunggal karena bersifat sangat subjektif dan multidimensional (mempunyai

banyak dimensi atau aspek yang berbeda), maka kesejahteraan di dalam penelitian ini menggunakan data IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sebagai alat bantu pengukur kesejahteraan secara umum.

Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator yang menjelaskan bagaimana masyarakat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesejatan, pendidikan, dan banyak hal lainnya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan suatu negara dalam membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

Adapun kesejahteraan masyarakat yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2024.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang, yang menjadi salah satu indikator dalam keberhasilan pembangunan sehingga adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Machmud A. , 2016)

Sedangkan dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi yang menggunakan data PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2024. PDRB adalah nilai total dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu.

3. Upah Minimum

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industry untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. (Indra Riko Rosandi, 2017). Upah minimum juga dapat dikatakan sebagai upah terendah yang akan dijadikan standar oleh majikan untuk menentukan upah yang sebenarnya dari buruh yang bekerja di perusahaannya.

Upah minimum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Upah Minimum di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2024.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dikatakan dengan kesejahteraan dapat diartikan sebagai aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Dalam pengertian yang berbeda, kesejahteraan adalah kondisi yang menghendaki kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan agar dapat terpenuhi, sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan. Dalam konsep dunia modern kesejahteraan diartikan sebagai sebuah keadaan bagi seseorang dimana ia dapat mencukupi kebutuhannya yang pokok, baik terkait dengan kebutuhan akan pangan, kebutuhan sandang maupun papan, juga dapat mengakses pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, tersedianya air bersih yang mampu mengangkat kualitas kehidupannya pada kedudukan sosial seseorang yang sepadan dengan orang lain. (Fadilah, 2020)

Kementerian koordinator kesejahteraan rakyat juga memberikan definisi mengenai masyarakat sejahtera yaitu suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan tersebut seperti kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan lainnya. Serta juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi dan terwujudnya masyarakat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Ekasari, 2020)

Adapun pengertian kesejahteraan menurut HAM, pengertian kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa

sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM (Sejahtera merupakan bebas akan berbagai macam masalah dan lain-lain, aman dan damai juga Makmur. Kesejahteraan juga berarti hal atau keadaan tercukupi, Keamanan, kedamaian, selamat dan tentram (Pustaka, 2010) secara terminologi, para ilmuwan barat sudah mengungkapkan makna kesejahteraan dengan berbagai pengertian, Gasper telah membicarakan maksud kesejahteraan sebagai satu konsep yang digunakan untuk dirujuk kepada apa sahaja yang digunakan bagi menilai situasi dan keadaan kehidupan seseorang. Mudahnya, ia merupakan satu penerangan tentang keadaan hidup seseorang manusia.

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat, Pandangan masyarakat umum, dalam keluarga yang sejahtera maka mampu menyekolahkan anggota keluarganya hingga setinggi mungkin. Sama halnya jika semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan membawa keluarganya semakin sejahtera karena mendapatkan timbal balik seperti pekerjaan yang mapan dan pendapatan yang mencukupi. Kesejahteraan merupakan tujuan dari seluruh keluarga. Kesejahteraan diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan untuk bisa hidup layak, sehat, dan produktif. Berdasarkan data BPS, masih terdapat sekitar 28 juta orang atau 10,8% penduduk yang tinggal di bawah garis kemiskinan atau mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan pokoknya. Sumatera Barat berada pada posisi tiga terendah setelah Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang di atas

dapat diartikan bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Pemerintah Republik Indonesia juga memberikan definisi kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. (UU no 11 Tahun 2009)

Kesejahteraan menurut *United Nations Development* program UNDP: Kesejahteraan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian “adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik” (UNDP 2020). Kesejahteraan menurut BAPPENAS: Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau kelompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. (BAPPENAS 2020)

Kesejahteraan menurut UUD 1945: Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (UUD RI 1945). Kesejahteraan menurut world bank: kesejahteraan yang didefinisikan adalah kehilangan rasa kemiskinan. Dengan menggunakan ukuran batas kemiskinan PPP (*purchasing power parity*) US \$ perkapita perhari, yaitu nilai tukar yang menunjukkan daya beli mata uang di suatu negara, untuk membeli barang dan jasa yang sama di negara lain.

b. Teori kesejahteraan

Arthur Cecil Pigou melalui karyanya *The Economics of Welfare* (Pigou, 1920) dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam teori kesejahteraan (*welfare economics*). Menurut Pigou, kesejahteraan ekonomi merupakan bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat diukur

melalui tingkat kemakmuran material suatu masyarakat. Ia menekankan bahwa kesejahteraan akan meningkat apabila terjadi efisiensi alokasi sumber daya, peningkatan pendapatan, dan distribusi yang adil.

Pigou memandang bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi mampu:

- 1) Meningkatkan pendapatan nasional yang pada gilirannya memperluas kesempatan kerja.
- 2) Memperluas kapasitas produksi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi lebih baik.
- 3) Menyediakan sumber pembiayaan bagi pemerintah untuk melaksanakan program sosial melalui pajak dan subsidi. (Pigou, 1920)

Namun demikian, Pigou juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan apabila tidak memperhatikan masalah distribusi. Oleh sebab itu, ia mengajukan pentingnya intervensi pemerintah untuk mengoreksi market failure melalui kebijakan perpajakan, subsidi, maupun regulasi, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. (Pigou, 1920)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut Pigou, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi hasil pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang hanya menambah kekayaan pada kelompok tertentu tidak mencerminkan peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh, sehingga kebijakan publik yang adil menjadi faktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Selain itu beberapa teori kesejahteraan masyarakat ikut dijelaskan oleh teori-teori berikut:

1) Teori Utilitarianisme (Jeremy Bentham, John Stuart Mill).

Teori ini mengemukakan bahwa kesejahteraan individu tercapai ketika mereka merasakan kebahagiaan atau kenikmatan terbesar, sementara penderitaan atau rasa sakit harus diminimalkan. Dalam konteks sosial, kesejahteraan dapat dilihat sebagai total kebahagiaan atau utilitas yang tercapai oleh masyarakat. Prinsip utilitarian adalah "kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar."

2) Teori Kesejahteraan Ekonomi (Adam Smith, John Maynard Keynes).

Dalam teori ekonomi, kesejahteraan sering diukur melalui konsep pendapatan, konsumsi, atau akses terhadap barang dan jasa. Ekonom seperti Adam Smith berpendapat bahwa kesejahteraan individu dapat dicapai melalui kebebasan ekonomi dan pasar bebas. Sementara itu, Keynes menekankan peran intervensi pemerintah untuk mencapai kesejahteraan sosial, terutama melalui kebijakan fiskal dan pengeluaran pemerintah. (Skousen, 2015)

3) Teori Kesejahteraan Sosial (Amartya Sen).

Ekonom Amartya Sen mengembangkan teori kesejahteraan yang berbasis pada kemampuan (capabilities). Dalam pandangannya, kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh pendapatan atau barang yang dimiliki seseorang, tetapi juga oleh kemampuan individu untuk menjalani hidup yang mereka nilai berharga. Sen menekankan pentingnya kebebasan untuk memilih dan mengakses berbagai kesempatan dalam kehidupan. (Sunaryo, 2017)

4) Teori Kesejahteraan Subjektif (Ed Diener, Daniel Kahneman)

Teori ini lebih fokus pada persepsi individu terhadap kesejahteraan mereka. Kesejahteraan subjektif mencakup kebahagiaan, kepuasan hidup, dan pengalaman emosional positif atau negatif yang dialami oleh seseorang. Ed Diener, salah satu pionir dalam bidang ini, mengukur kesejahteraan dengan menggabungkan evaluasi kognitif tentang kehidupan dan emosi positif. (Greve, 2021)

5) Teori Maslow tentang Hierarki Kebutuhan.

Abraham Maslow mengembangkan teori yang mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia dalam bentuk hierarki. Kesejahteraan tercapai ketika kebutuhan fisik, rasa aman, cinta dan penerimaan, penghargaan, dan aktualisasi diri dapat terpenuhi secara bertahap. Menurut Maslow, individu tidak dapat mencapai kesejahteraan yang tinggi tanpa memenuhi kebutuhan dasar mereka terlebih dahulu. (Calicchio, 2023)

c. Indikator Kesejahteraan

Dalam Penelitian Eko Sugiharto, menurut BPS tahun 2015 indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada 8, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

- 1) Konsumsi dan pengeluaran Indikator pengeluaran dapat digolongkan menjadi 3 item, yaitu:
 - a) Tinggi, Kesejahteraan seseorang berdasarkan tingkat konsumsi dan pengeluarannya dapat dikatakan tinggi apabila pengeluaran keluarga terhitung per bulan sebesar >Rp. 5.000.000,-.
 - b) Sedang, Kriteria kesejahteraan ekonomi yang termasuk dalam kategori sedang apabila pengeluaran keluarga per bulan sebesar Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000.
 - c) Rendah, Kriteria kesejahteraan ekonomi jika dilihat dari tingkat konsumsi dan pengeluaran termasuk dalam kategori rendah apabila pengeluaran keluarga per bulan sebesar < Rp. 1.000.000.
- 2) Keadaan tempat tinggal

Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas

lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- a) Permanen, Kriteria permanen ditentukan oleh kualitas dinding, atap dan lantai. Bangunan rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/kayu kualitas tinggi, lantai terbuat dari ubin/keramik/kayu kualitas tinggi dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes (BPS, 2012)
- b) Semi Permanen, Rumah semi permanen adalah rumah yang dindingnya setengah tembok/bata tanpa plaster/kayu kualitas rendah, lantainya dari ubin/semen/kayu kualitas rendah dan atapnya seng/genteng/sirap/asbes. (BPS 2012)
- c) Non Permaen, Sedangkan rumah tidak permanen adalah rumah yang dindingnya sangat sederhana (bambu/papan/daun) lantainya dari tanah dan atapnya dari daundaunan atau atap campuran genteng/seng bekas dan sejenisnya (BPS, 2012).

3) Fasilitas tempat tinggal

Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- a) Lengkap, Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal sudah mempunyai 12 item yang disebutkan di atas dengan kondisi baik atau layak pakai.
- b) Cukup, Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal mempunyai fasilitas setidaknya lebih dari 6 item yang disebutkan dengan kondisi layak pakai.
- c) Kurang, Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal mempunyai fasilitas kurang dari dari 6 item yang disebutkan dengan kondisi layak pakai. (BPS 2012)

4) Kesehatan

Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 2 item, yaitu:

- a) Bagus, Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga setidaknya <25% kehidupan mereka yang berada dalam kondisi sakit.
- b) Cukup, Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga mempunyai prosentase kesehatan berada pada kisaran 25% - 50% dibandingkan dengan kondisi sakit.
- c) Kurang, Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga mempunyai prosentase kesehatan di bawah rata-rata atau >50% kehidupan mereka yang berada dalam kondisi sakit. (BPS 2012)

5) Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan

Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- a) Mudah, Golongan ini berarti apabila 5 aitem dari penjelasan di atas sudah terpenuhi semua.
- b) Cukup, Golongan ini berarti apabila 5 aitem dari penjelasan di atas ada yang tidak terpenuhi, namun tidak lebih dari 2 item atau setidaknya 3 item dari indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan dapat terpenuhi.
- c) Sulit, Golongan ini berarti apabila 5 aitem dari penjelasan di atas lebih banyak yang tidak terpenuhi atau lebih dari 3 item indikator tidak terpenuhi. (BPS 2012)

6) Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan

Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah,

dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- a) Mudah, Golongan ini berarti 3 indikator dari kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan sudah terpenuhi.
- b) Cukup, Golongan ini berarti dari 3 indikator kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan salah satunya ada yang tidak terpenuhi.
- c) Sulit, Golongan ini berarti 3 indikator dari kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan hanya 1 indikator yang dapat dipenuhi. (BPS 2012)

7) Kemudahan mendapatkan transportasi

Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Dari 3 item tersebut kemudian akan di digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- a) Mudah, Golongan ini menunjukkan bahwa 3 item dari kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapat transportasi sudah dapat terpenuhi semua.
- b) Cukup, Golongan ini menunjukkan bahwa 3 item dari kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapat transportasi sudah ada salah satu indikator yang tidak terpenuhi.
- c) Sulit, Golongan ini menunjukkan bahwa 3 item dari kesejahteraan ekonomi. (BPS 2012)

d. Kesejahteraan dalam Islam

Kesejahteraan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (Maqasid al-Shari'ah). Untuk merasakan kedamaian dan kebahagiaan dalam jiwa manusia tidak akan bisa kecuali sesudah terwujudnya kesejahteraan sesungguhnya bagi semua manusia di atas bumi ini dengan jalan tecukupinya bermacam kebutuhan secara lahir dan batin. Sebagai jalan menuju syara agar bisa diwujudkan

kemaslahatan, digambarkan secara luas oleh beliau berkaitan dengan asalnya, ialah terjaganya agama, batin, akal fikiran, kekayaan juga keturunan. (Rohman, 2010)

Di dalam silam sendiri ada ayat yang menjelaskan pola kehidupan umat islam dalam mencapai kesejahteraan yaitu Q.S Al-Qasas/28: 77.

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Dalam ayat ini Allah SWT. Memperingatkan Qarun (nama asli Qarun bin Yashhab bin Qahisy, dimana ia adalah orang yang bergelimang harta akan tetapi sombong dengan apa yang Allah SWT. berikan padanya.

Dalam perspektif Islam, kesejahteraan masyarakat sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan upah. Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif islam harus membawa keberkahan dan pemerataan manfaat serta islam menolak pertumbuhan yang hanya menimbulkan kesenjangan. Pertumbuhan ekonomi dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan output dan pendapatan nasional, tetapi juga harus mampu menghadirkan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan membuka lapangan kerja, meningkatkan daya beli, dan memperluas distribusi pendapatan, sehingga mendukung tercapainya

tujuan maqāsid al-syarī‘ah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Beik & Arsyianti, 2016).

Selanjutnya, faktor upah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan karena menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Islam menekankan keadilan dalam pemberian upah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, *“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”* (HR. Ibnu Majah), yang menunjukkan bahwa upah harus diberikan secara adil, layak, dan tepat waktu (Karim, 2021). Apabila upah sesuai dengan standar kelayakan, maka akan tercapai kesejahteraan masyarakat (bukan hanya sekedar bertahan hidup, tetapi juga menjaga masratabat manusia).

Pertumbuhan ekonomi dan upah apabila diatur sesuai nilai Islam akan mendorong tercapainya kesejahteraan (material dan spiritual). Pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan pemberian upah yang layak merupakan dua instrumen penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Chapra (2000) menyatakan bahwa kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur dengan indikator material, tetapi juga dengan terpenuhinya tujuan syariat (maqashid syariah), seperti terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan prinsip masalah, pengaturan ekonomi dalam Islam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kebijakan upah berjalan selaras untuk menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat (Chapra, 2000).

2. Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila ada kecenderungan output per kapita untuk naik yang bersumber dari kekuatan yang berada dalam perekonomian itu sendiri, bukan berasal dari luar atau bersifat sementara. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai salah satu ukuran kuantitatif yang menggambarkan

perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (Sukirno, 2011)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu perekonomian (Todaro, 2005). Kesejahteraan dan kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan *output* nasional. Adanya perubahan *output* dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Secara umum teori pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis didasarkan pada kepercayaan akan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ekonomi klasik merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonomi yang hidup pada abad 18 hingga awal abad 20, teori lain menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori pertumbuhan ekonomi modern. Karakteristik umum teori ini mengakui pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian untuk mengatasi kegagalan sistem pasar bebas. Kelompok ini cenderung tidak mengakui keefektifan sistem pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah. (Ma'ruf, 2008)

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang, dan pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena penting yang dialami dunia belakangan ini. Proses pertumbuhan ekonomi tersebut dinamakan sebagai *Modern Economic Growth*. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan output perkapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti dalam jangka panjang, kesejahteraan tercermin pada peningkatan output perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Indonesia, sebagai suatu negara yang sedang berkembang sedang giat melaksanakan pembangunan secara berencana dan bertahap, tanpa mengabaikan usaha pemerataan dan kestabilan.

Pembangunan nasional mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang pada akhirnya memungkinkan terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat. (Ma'ruf, 2008)

Menurut Untoro, pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Kuznets pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. (Untoro, 2010)

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses peningkatan output per kapita dalam jangka panjang. Di mana kesejahteraan tercermin pada peningkatan output perkapita yang memberikan banyak pilihan untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang diikuti oleh daya beli masyarakat yang terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi juga berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan produksi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Kemampuan suatu negara menghasilkan barang dan jasa akan meningkat disebabkan karena faktor-faktor produksi mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya.

Menurut teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh *Rostow*, negara-negara maju seluruhnya telah melampaui tahapan yang dinamakan “tinggal landas menuju pertumbuhan ekonomi berkesinambungan yang berlangsung secara otomatis”. Sedangkan negara-negara yang sedang berkembang atau masih terbelakang, pada umumnya masih berada didalam tahapan masyarakat tradisional atau tahapan kedua, yakni tahapan penyusunan kerangka dasar tinggal

landas. Tidak lama lagi, hanya tinggal merumuskan serangkaian aturan pembangunan untuk tinggal landas, mereka akan segera bergerak menuju ke proses pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkesinambungan (Todaro, 2006). *Rostow* membagi tingkat-tingkat pertumbuhan berdasarkan proses pembangunan ekonomi suatu negara menjadi lima tahapan, yaitu:

- 1) Tahap perekonomian tradisional
- 2) Tahap pra kondisi tinggal landas
- 3) Tahap tinggal landas
- 4) Tahap menuju kedewasaan
- 5) Tahap konsumsi massa tinggi

Dalam zaman ahli ekonomi klasik, seperti Adam Smith dalam buku karangannya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth Nations*, menganalisis sebab berlakunya pertumbuhan ekonomi dan faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Setelah Adam Smith, beberapa ahli ekonomi klasik lainnya seperti Ricardo, Malthus, Stuart Mill, juga membahas masalah perkembangan ekonomi.

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi

1) Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Teori ini memberikan perhatiannya pada pengaruh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori ini mengasumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal. Menurut teori ini, pada mulanya pertambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin

berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal. (Sukirno, 2011)

Menurut teori ini, kekayaan alam, luas tanah, dan teknologi tidak akan berubah karena penambahan penduduk. Teori penduduk optimal menggambarkan hubungan antara pendapatan perkapita dan jumlah penduduk. Teori ini awalnya menyatakan bahwa peningkatan penduduk akan menghasilkan peningkatan pendapatan perkapita, tetapi hukum hasil yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, atau produksi marginal, dan pada akhirnya pendapatan perkapita akan sama dengan produksi marginal.

Para ahli ekonomi mengatakan bahwa disaat jumlah penduduk sedikit dan kekayaan alam banyak, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dihasilkan akan tinggi. Para pengusaha akan mendapatkan keuntungan besar, mendorong investasi baru, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Namun, ketika pertumbuhan penduduk terlalu tinggi, pertumbuhan tersebut akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk menurun, kemakmuran masyarakat menurun, dan pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih rendah (Huda, 2015)

2) Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori Neo-Klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Terus berkembang berdasarkan analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ahli ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori pertumbuhan tersebut adalah Robert Solow, Edmund Phelps, Harry Johnson dan J.E. Meade. Dalam analisa neo klasik pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi sebab perekonomian akan tetap mengalami

tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan digunakan sepenuhnya dari waktu ke waktu. (Sukirno, 2011)

3) Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan perkembangan langsung dari teori pertumbuhan makro John Maynard Keynes. Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal. Untuk memacu proses pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan netto terhadap cadangan atau stok modal (*capital stock*). Teori ini menekankan pentingnya peran akumulasi modal dalam proses pertumbuhan, dimana setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal yang rusak. (Sukirno, 2011)

4) Teori Schumpeter

Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan mengatakan bahwa kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa usaha (*entrepreneurship*) dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru, maupun memperluas usaha yang telah ada.

Berdasarkan pendapatnya, Schumpeter menunjukkan betapa pentingnya pengusaha untuk pertumbuhan ekonomi. Pengusaha yang ingin membeli reformasi akan meminjam modal dan melakukan penanaman modal. Investasi baru akan meningkatkan kegiatan perekonomian. (Sukirno, 2011)

5) Pertumbuhan Ekonomi Modern

Teori pertumbuhan Rostow dan Kunzet adalah bagian dari teori pertumbuhan ekonomi modern. Menurut Rostow, pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai pergeseran dari masyarakat tradisional, tahap prasyarat tinggal landas, tahap tinggal

landas, dan tahap menuju kedewasaan, dan masyarakat yang berkonsumsi tinggi. (Hewi, 2017)

c. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Sumber daya manusia sama dengan proses pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, dan seberapa cepat atau lambat prosesnya tergantung pada sejauh mana subjek pembangunan memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakannya (Todaro & Smith, 2011)

- 1) Faktor sumber daya alam, sebagian besar negara menggunakan sumber daya alam untuk melaksanakan proses pembangunan. Namun, keberhasilan proses pembangunan ekonomi tidak dapat dijamin hanya dengan sumber daya alam jika tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam. Kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan, dan kekayaan laut adalah semua contoh sumber daya alam. (Sukirno, 2016).
- 2) Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, pola kerja yang sebelumnya membutuhkan tangan manusia akan digantikan oleh mesin yang lebih canggih. Ini berdampak pada efisiensi, kualitas, dan kuantitas aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan, dan pada akhirnya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat. (Jhingan, 2014)
- 3) Faktor budaya, faktor budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan; hal-hal seperti sikap kerja keras, kerja cerdas, jujur, dan ulet adalah beberapa contoh sifat budaya yang dapat membangkitkan atau mendorong pembangunan (Todaro & Smith, 2011).
- 4) Ada beberapa budaya yang dapat menghambat kemajuan, seperti sikap anarkis, egois, boros, dan KKN (Suryana, 2013).

5) Sumber daya modal, untuk mengelola SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK, diperlukan sumber daya manusia. Sumber daya modal. Sumber daya modal, yang terdiri dari barang-barang modal, sangat penting untuk perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena mereka memiliki potensi untuk meningkatkan produktifitas (Sukirno, 2016).

d. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu:

1) Aglomerasi

Aglomerasi, juga dikenal sebagai pola pemusatan, adalah ketika berbagai industri berkumpul di satu tempat sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi baru.

2) Investasi

Investasi adalah penanaman modal pada suatu perusahaan untuk meningkatkan jumlah produksi dengan menambah barang modal dan peralatan produksi yang sudah ada.

3) Angkatan kerja yang bekerja

Angkatan kerja yang berkerja adalah orang-orang yang berusia 10 tahun atau lebih dan sedang mencari pekerjaan atau aktivitas lain.

4) *Human capital investasi*

Human capital investasi adalah pengaruh pendidikan formal terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu pendidikan formal yang lebih tinggi akan meningkatkan produktifitas kerja seseorang. (Pambudi E. W., 2018)

Faktor produksi dianggap sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan; perubahan dalam faktor produksi menyebabkan naik turunnya laju pertumbuhan ekonomi (Jhingan, 2014). Faktor ekonomi dan non ekonomi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor ekonomi termasuk sumber alam, akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi, pembagian kerja, dan skala produksi (Sukirno, 2016). . Faktor non ekonomi termasuk faktor sosial, kualitas

sumber daya manusia, faktor politik, dan administrasi (Todaro & Smith, 2011)..

3. Upah Minimum

a. Pengertian Upah

Menurut pernyataan profesor Bentham, upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.

Menurut Mankiw, upah senantiasa menyesuaikan diri demi terciptanya keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Upah dan kuantitas tenaga kerja telah menyesuaikan diri guna menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Ketika pasar berada dalam kondisi ekuilibrium, masing-masing perusahaan “membeli” tenaga kerja dalam jumlah yang menguntungkannya, berdasarkan harga atau upah ekuilibrium itu berarti setiap perusahaan telah merekrut pekerja dalam jumlah dimana nilai produk marginal sama dengan upah (Kiran R, 2014).

Upah minimum adalah standar minimum bagi pengusaha atau pelaku industri untuk membayar pekerja di lingkungan usaha atau lingkungan kerja. (Erliza Millenia Putri, 2021) Upah minimum provinsi yang tinggi yang ditetapkan pemerintah dapat menjadi faktor penting untuk kesejahteraan masyarakatnya yang bekerja. Tidak hanya itu, jika upah minimum provinsi yang memadai akan meningkatkan semangat para masyarakat untuk terus bekerja dan memenuhi kebutuhan mereka. Upah minimum adalah salah satu sumber pendapatan, jika pendapatan berkurang atau tetap maka juga terjadi hal yang sama dengan kesejahteraan. (Ningrum, 2017)

Menurut PP Pengupahan No. 78 Tahun 2015, Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi. UMP ditetapkan oleh gubernur dan berbeda-beda antara satu provinsi dengan yang lain, dengan dasar

penentuan yang meliputi kebutuhan hidup layak, indeks harga konsumen, kemampuan perkembangan, kelangsungan perusahaan, upah umum, kondisi pasar, tingkat perekonomian, dan pendapatan per kapita.

Upah minimum kabupaten/kota adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industry untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Keputusan menteri atau tenaga kerjadan transmigrasi No. KEP-266/MEN/2000 tahun 2000 tentang peraturan upah minimum:

- 1) Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
- 2) Upah minimum provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi.
- 3) Upah minimum kabupaten/kota adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kota.

Menurut UU pasal 4 ayat 3 peraturan upah minimum mengatakan bahwa gubernur dalam menetapkan UMK harus lebih besar dari UMP adapun menurut pasal 13 (yang telah diubah ke pasal 12) ayat 2 peraturan upah minimum di daerah sudah ada penetapan UMK dan perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari UMK.

b. Teori Upah

- 1) Teori Pendapatan Absolut – John Maynard Keynes

Keynes (1936) dalam *The General Theory of Employment, Interest and Money* menekankan bahwa tingkat konsumsi masyarakat dipengaruhi langsung oleh pendapatan absolut yang mereka peroleh pada periode tertentu. Kenaikan pendapatan, termasuk upah, akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga kebutuhan dasar dapat terpenuhi (Keynes, 1936)

Semakin tinggi pendapatan absolut yang diterima rumah tangga, semakin tinggi pula tingkat konsumsi terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan untuk hidup layak. Kesejahteraan masyarakat

dapat meningkat apabila kenaikan upah diikuti dengan kenaikan daya beli serta pengurangan kemiskinan. (Mankiw, 2019)

Dengan demikian, teori Keynes menunjukkan bahwa pendapatan absolut berperan langsung terhadap konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi tidak serta-merta mengurangi ketimpangan ekonomi (Todaro, 2020).

2) Teori Pendapatan Relatif – James Duesenberry

Duesenberry (1949) mengembangkan hipotesis pendapatan relatif yang menekankan bahwa konsumsi tidak hanya ditentukan oleh pendapatan absolut, tetapi juga dipengaruhi oleh perbandingan sosial (*relative income*). Dalam masyarakat, seseorang merasa sejahtera tidak hanya karena tingkat pendapatannya cukup, melainkan juga karena posisi ekonominya dibandingkan dengan orang lain (Duesenberry, 1949)

Efek Demonstrasi: Masyarakat terdorong meningkatkan konsumsi karena pengaruh gaya hidup kelompok lain yang lebih tinggi pendapatannya. Hal ini dapat meningkatkan standar hidup, tetapi sekaligus menciptakan tekanan sosial yang membuat sebagian kelompok merasa tidak sejahtera meski pendapatannya mencukupi. (Frank, 2005)

Efek Ketertinggalan (*Ratchet Effect*): Sekali masyarakat terbiasa pada standar konsumsi tertentu, mereka enggan menurunkan konsumsi walaupun pendapatan menurun. Akibatnya, kesejahteraan bisa menurun bukan karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi, tetapi karena ketidakpuasan relatif terhadap standar hidup sebelumnya. (Frank, 2005)

Teori ini menjelaskan mengapa dalam masyarakat yang ekonominya tumbuh, masih sering terjadi ketidakpuasan dan ketidakmerataan kesejahteraan, karena sebagian masyarakat menilai kesejahteraan mereka secara relatif terhadap kelompok lain, bukan semata-mata dari kecukupan pendapatan absolut (Wilkinson, 2010)

3) Relevansi Teori terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Keynes (Absolut): Meningkatkan pendapatan atau upah minimum dapat langsung mendorong kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan konsumsi dan pemenuhan kebutuhan dasar. Namun, kebijakan ini belum tentu mengurangi kesenjangan. (Blanchard, 2017)

Duesenberry (Relatif): Kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari kecukupan pendapatan, tetapi juga dari rasa keadilan, kesetaraan, dan standar hidup relatif. Oleh karena itu, meskipun rata-rata pendapatan masyarakat meningkat, kesenjangan sosial tetap menjadi tantangan serius dalam pencapaian kesejahteraan yang merata (Sen, 1999)

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan upah minimum

1) Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Sejak ditetapkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan upah minimum. Berdasarkan Permenaker No. 17 Tahun 2005, tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian KHL, yang dimaksud dengan KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik, dan sosial untuk kebutuhan satu bulan. (Mankiw, 2013)

2) Indek Harga Konsumen (IHK)

Upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga kebutuhan pokok yang tercermin dalam IHK. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IHK adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. (Mankiw, 2013)

3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Penetapan gaji atau upah minimum dilaksanakan setiap tahun untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. (Mankiw, 2013)

d. Komponen upah dan pengelompokan upah

Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 07/MEN/1990 tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan nonupah disebutkan bahwa:

- 1) Upah pokok merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian.
- 2) Tunjangan tetap merupakan suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok seperti tunjangan anak, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan kehamilan, tunjangan makan, tunjangan transport dapat dimasukkan dalam tunjangan pokok asalkan tidak dikaitkan dengan kehadiran buruh, dengan kata lain tunjangan tersebut diberikan tanpa mengindahkan kehadiran buruh dan diberikan bersamaan dengan upah pokok.
- 3) Tunjangan tidak tetap merupakan suatu pembayaran yang secara tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak

tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok.

e. Kebijakan Pemerintah Tentang Upah

1) PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

PP ini mengatur kebijakan pengupahan, penetapan upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil, struktur dan skala upah, upah minimum, upah terendah pada usaha mikro dan usaha kecil, perlindungan upah, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya, dewan pengupahan, dan sanksi administratif. Upah terdiri atas komponen : 1) upah tanpa tunjangan; 2) upah pokok dan tunjangan tetap; 3) upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atau 4) upah pokok dan tunjangan tidak tetap.

2) (PP) 51 tahun 2023

PP ini mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 36 Tahun 2021. Ruang lingkup perubahan PP Nomor 36 Tahun 2021 ini mencakup perubahan atas ketentuan mengenai formula penghitungan Upah minimum, penetapan dan pemberlakuan Upah minimum, serta penguatan peran dewan pengupahan di daerah.¹³

3) Pasal 88 ayat (2) UU 6/2023

Peraturan ini mengatur pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan itu meliputi penetapan upah minimum setiap tahun.

f. Upah dalam Ekonomi Islam

Di dalam Islam, upah termasuk dalam kajian fiqih muamalah yaitu ijarah. Menurut Sayyid Sabiq al ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al 'iwadhu (ganti). Dari sisi pandang etimologis, ijarah adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan pekerjaannya.

Upah atau gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi. Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. (Muhammad Sulaiman, 2010) Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti iwad (ganti), oleh sebab itu al-sawab (pahala) dinamai juga al-ajru atau al-ujrah (upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan

4. Keterkaitan Antar Variabel

a. Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Rahman (2023), pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang memegang peranan yang lumayan penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama dalam hal menganalisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh suatu daerah atau suatu negara. Pertumbuhan suatu daerah yang terus menunjukkan peningkatan maka itu menggambarkan bahwa perekonomian daerah tersebut berkembang dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang baik tersebut yang akhirnya menunjukkan sejauh mana aktivitas ekonomi menghasilkan kesejahteraan masyarakat pada periode-periode tertentu. (Rahman, Ekonomi Demografi dan Kependudukan, 2023)

Sejalan dengan hal itu, Nur (2024) mengatakan salah satu usaha atau upaya strategis pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan mengusahakan mengejar pertumbuhan ekonomi dalam proses pembangunan. Serta pemerintah melakukan kebijakan pembangunan yang tepat dengan sumber yang ada dan tersedia, kemudian melakukan pemilihan dari sektor ekonomi yang memiliki kontribusi terpenting peranannya dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas guna menyejahterakan masyarakatnya. (Nur, 2024)

Multiplier effect oleh Keynes memberikan penjelasan bahwa setiap pengeluaran tambahan (konsumsi atau investasi) akan menimbulkan efek ganda pada pendapatan nasional. Semakin besar nilai efek ganda, maka semakin besar pula dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa kasus, pertumbuhan ekonomi selalu dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan gambaran keberhasilan penerapan kebijakan makro ekonomi di suatu wilayah, yang pada akhirnya akan berdampak positif baik pada pemerintah pusat maupun daerah. Ini sejalan dengan gagasan bahwa pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga sebagai argumen untuk memuliakan negara dan penguasa. (Mardiyah, 2024)

b. Keterkaitan Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan antara lain adalah jumlah tanggungan keluarga, pendapatan keluarga, umur, tabungan, beban hutang keluarga, dan lokasi tempat tinggal.

Dalam bukunya, Gunawan (2025) mengatakan bahwa upah dapat dikatakan sebagai bentuk nilai atau harga dari tenaga kerja. Upah mencerminkan kontribusi pekerja dalam proses produksi dan pertumbuhan ekonomi. Namun tidak hanya berupa uang tunai, upah juga dapat melingkupi berbagai bentuk lain seperti tunjangan, fasilitas kesehatan, asuransi, dan manfaat tambahan lainnya yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Upah berupa uang tunai (*fringe benefits*) dapat memberikan perlindungan sosial serta kesejahteraan lebih bagi pekerja, serta menjadi daya tarik bagi perusahaan untuk mempertahankan tenaga kerja berkualitas. (Gunawan, 2025)

Adapun tujuan dari penerapan upah minimum ialah untuk memberikan upah yang layak bagi para pekerja, dimana hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan mereka dan juga akan meningkatkan produktivitas. Tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No:

Per- 01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, pemberian upah minimum yang lebih tinggi memiliki potensi mengurangi tingkat kemiskinan. Tujuan dari hal tersebut ialah untuk mencegah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. (Suhaimi, 2024)

Sistem pengupahan harus diperhatikan karena jika pemberian upah baik, maka tidak hanya melindungi hak pekerja tetapi juga memberikan kontribusi pada stabilitas ekonomi dan perusahaan. Dengan system pemberian upah yang adil diharapkan tercipta hubungan yang baik antar pekerja dan pengusaha, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (Tamsiya, 2025)

c. Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi dengan upah memiliki hubungan yang saling mempengaruhi, dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan upah. Sedangkan sebaliknya upah yang tinggi dapat memacu dan meningkatkan produktivitas serta semangat para pekerja sehingga pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini secara tidak langsung akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

Teori kesejahteraan utilitarian oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill (Bdk, 2020) menekankan pada pencapaian kesejahteraan maksimum bagi semua masyarakat. Kesejahteraan diukur atas dasar sejauh mana pertumbuhan ekonomi bisa meningkatkan utilitas (kepuasan). Secara tidak langsung jika pertumbuhan ekonomi menghasilkan kenaikan upah yang mampu meningkatkan standar hidup masyarakat, maka akan dapat diambil kesimpulan bahwa kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat.

Menurut Wascher (2010), terdapat hubungan saling menguntungkan antara pertumbuhan ekonomi dan upah minimum.

Pertumbuhan ekonomi yang positif dapat menyediakan dana dan kesempatan untuk peningkatan upah minimum, sementara upah minimum yang lebih tinggi meningkatkan daya beli masyarakat, yang mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut dan menciptakan ruang untuk meningkatkan upah bagi para pekerja. Ini adalah siklus yang dapat memperbaiki kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan menyebabkan pemerintah memiliki kesempatan untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk program-program kesejahteraan sosial dan penyesuaian upah minimum yang lebih tinggi. (Wascher, 2010)

Upah minimum ditetapkan dengan adanya pertimbangan atas standar layak hidup dengan memperhatikan produktivitas pertumbuhan ekonomi. Upah minimum diciptakan dengan tujuan menyetarakan bagi masyarakat yang memiliki pendapatan rendah terkhusus bagi pekerja yang memiliki status hidup miskin serta juga untuk memenuhi standar hidup minimum masyarakat misal efisiensi, kesehatan dan kesejahteraan pekerja. (Rahman, 2023)

B. Penelitian Relevan

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Tingkat Pengangguran terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Timur Tahun 2014-2018, Shella Okky Shavira, Mohammad Balafif, 2021. Dengan hasil penelitian ini dengan H_1 diterima yaitu variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur tahun 2014-2018 dan untuk variabel upah minimum H_1 diterima sehingga variabel upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur tahun 2014-2018. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat upah minimum terhadap kesejahteraan masyarakat sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian ini juga meneliti tingkat pengangguran sebagai

variabel X3. Perbedaan yang lainnya yaitu daerah yang diteliti oleh penulis.

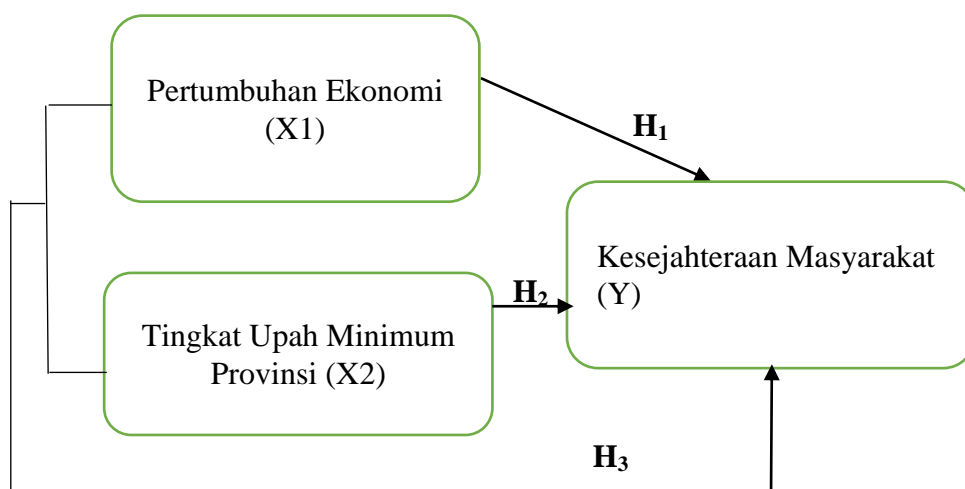
2. Pengaruh Upah Minimum Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali, I Gede Allen Sanjaya, Ida Ayu Nyoman Saskara, 2022. Dengan hasil penelitian Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, sedangkan Investasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Ketimpangan distribusi pendapatan tidak berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pengaruh upah minimum terhadap kesejahteraan masyarakat dan perbedaannya terdapat pada variabel X2 yang berbeda dan penelitian ini menggunakan variabel Y sebanyak 2 buah variabel.
3. Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat, Kadek Bagus Siwa Nata Mahendra, Sudarsana Arka, 2021. Dengan hasil penelitian upah minimum dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2014-2018. Upah minimum provinsi, tingkat pendidikan dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2014-2018. Penyerapan tenaga kerja memediasi pengaruh upah minimum provinsi dan tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2014-2018. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pengaruh upah minimum terhadap

kesejahteraan masyarakat dan perbedaannya terdapat pada variabel X2 yang berbeda dan penelitian ini menggunakan variabel Y sebanyak 2 buah variabel.

4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali I Komang Oka Artana Yasa, Sudarsana Arka, 2015. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative dan signifikan terhadap disparitas pendapatan antar daerah. Disparitas pendapatan antardaerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di provinsi bali. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat provinsi Bali melalui disparitas pendapatan antar daerah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulit terdapat pada sama-sama membahas tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, adapun perbedaannya terletak pada variabel X2 yang berbeda, penelitian ini mengambil disparitas pendapatan antar daerah sedangkan penulis mengambil variabel tingkat upah minimum provinsi.
5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia, Dwi Kasiyati Durrotun Ni'mah, 2024. Hasil penelitian ini yaitu Hasil uji statistik memaparkan jika variabel Pertumbuhan Ekonomi memperoleh dampak baik serta signifikan pada Kesejahteraan. Ini mengindikasikan bahwa kenaikan atau penurunan dalam pertumbuhan ekonomi memperoleh dampak yang signifikan pada kesejahteraan. variabel Pendidikan berdampak baik serta tidak signifikan terhadap kesejahteraan. Pendidikan (X2) berdampak baik serta berpengaruh belum signifikan pada Kesejahteraan (Y). Hal tersebut memaparkan jika kenaikan serta pengurangan Pendidikan berdampak positif dan belum signifikan terhadap Kesejahteraan serta variabel UMP berdampak positif serta signifikan terhadap Kesejahteraan, Upah Minimum Provinsi (X2) berdampak baik serta signifikan terhadap Kesejahteraan (Y), dapat

disimpulkan bahwa memaparkan jika kenaikan serta pengurangan UMP berdampak positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menambahkan variabel pendidikan dalam penelitiannya, perbedaan lainnya terletak pada daerah yang diteliti. Penelitian ini meneliti dengan cakupan wilayah secara nasional yaitu negara sedangkan penulis hanya meneliti wilayah Provinsi Sumatera Barat.

C. Kerangka Berfikir



Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap suatu masalah, yang pada umumnya hipotesis ini dirumuskan guna menggambarkan adanya hubungan antara dua variabel, yaitu variabel penyebab dan variabel akibat, dan ada pula yang menggambarkan perbandingan antara satu variabel dari dua sampel.

Hipotesis juga merupakan suatu pernyataan sementara terhadap rumusan masalah yang ada di dalam suatu penelitian. Sifat sementara tersebut dikarenakan karena jawaban yang diberikan baru saja didasarkan pada teori yang relevan dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data. (Anshori M, 2017)

Berdasarkan pernyataan yang ada di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2024.

- a. H_01 = Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2024.
- b. H_a1 = Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2024.

2. Pengaruh Upah minimum terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat 2015-2024

- a. H_02 = Upah minimum tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2024.
- b. H_a2 = Upah minimum berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2024.

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah minimum terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat 2015-2024

- a. H_03 = Pertumbuhan Ekonomi, Upah minimum tidak berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat 2015-2024
- b. H_a3 = Pertumbuhan Ekonomi, Upah minimum berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat 2015-2024

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kuantitatif apabila dengan bertujuan untuk memberikan deskripsi dan penjelasan peristiwa atau suatu kejadian yang terjadi dalam bentuk angka-angka bermakna. Penelitian ini dipilih karena bertujuan untuk menjelaskan adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Barat dengan fokus 3 wilayah yaitu Kota Padang, Kabupaten Lima Pulu Kota, dan Kabupaten Tanah Datar waktu penelitian di mulai pada bulan Januari 2025, dengan rancangan waktu penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3. 1
Waktu Penelitian**

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penelitian 2025						
		Jan	Feb	Mar	Mei	Jun	Juli	Ags
1	Survey awal							
2	Pengajuan proposal							
3	Membuat dan bimbingan Proposal skripsi							
4	Seminar proposal							
5	Bimbingan Setelah Seminar Proposal							

6	Mengumpulkan dan menyiapkan data penelitian							
7	Mengolah data							
8	Membuat Pelaporan							
9	Bimbingan skripsi							
10	Sidang munaqasah							

C. Sumber Data

Sumber data yang ada dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder dari website Badan Pusat Statistik (BPS): <https://SumateraBarat.bps.go.id/id> meliputi data pertumbuhan ekonomi (PDRB), upah minimum provinsi (UMP) serta kesejahteraan masyarakat (IPM) pada tahun 2015-2024.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data panel atau data gabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Dalam penelitian ini, data panel yang digunakan mencakup 3 wilayah yaitu 1 kota (Kota Padang) dan 2 kabupaten (Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Tanah Datar) sebagai unit *cross section* dengan periode waktu 10 tahun (2015-2024).

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *scraping data*, yang merupakan salah satu proses pengumpulan data dari internet yaitu melalui website Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat. Data yang dikumpulkan yaitu komponen Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2024.

E. Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, model estimasi diharapkan dapat menganalisis hubungan antara variabel dependen dan variabel independen sehingga diperoleh model penelitian yang terbaik dengan menggunakan teknik analisis yang telah dijelaskan di atas. Uji penerimaan klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) meliputi uji normalitas, uji multikolonitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian asumsi klasik dari model yang dirumuskan. Harus ditentukan apakah model menyimpang dari asumsi klasik atau tidak. Tes asumsi klasik terdiri dari:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel rancu atau rasial dalam model regresi berdistribusi normal, atau untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara data dan mean data secara keseluruhan. Kondisi uji normalitas adalah sebagai berikut:

- 1) Jika Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal
- 2) Jika Sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinear merupakan asumsi yang tidak membutuhkan korelasi yang kuat antar variabel independen. Model tidak boleh memiliki korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen berkorelasi berarti variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal merupakan variabel bebas dimana nilai korelasi antar variabel bebas adalah nol. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara berikut:

- 1) Melalui nilai 1 hitung R, F ratio, jika R² tinggi, F ratio, sedangkan sebagian besar atau bahkan seluruh koefisien regresi tidak signifikan (nilai 1 hitung, sangat rendah) maka kemungkinan terjadi multikolinieritas.
- 2) Nilai R Square Auxiliary > R Square Awal
- 3) Nilai Variance Inflation Faktor (VIF) > 10, $VIF = \frac{1}{1-R^2}$

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual untuk semua pengamatan. Model regresi yang layak untuk dilakukan uji lanjutan adalah model yang mensyaratkan tidak adanya heterokedastisitas atau dengan kata lain harus bersifat homokedastisitas (residual memiliki varian yang konstan).

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan menggunakan uji white, alasan penggunaan uji ini adalah dikarenakan uji ini mampu mendeteksi bentuk umum heterokedastisitas. Hipotesis uji white sebagai berikut:

- 1) Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat heterokedastisitas.
- 2) Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya terdapat heterokedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat hubungan (korelasi) antara residual satu dengan residual lainnya dalam model regresi. Dalam penelitian ini digunakan uji *breusch-godfrey serial correlation LM Test* karena uji ini lebih fleksibel dibandingkan uji durbin Watson dalam mendeteksi autokorelasi, terutama ketika model mengandung lag variabel dependen. Hipotesis untuk uji ini adalah:

- 1) Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi.
- 2) Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya terdapat autokorelasi.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen. Adapun variabel independen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dan upah minimum provinsi sedangkan variabel dependen yaitu Kesejahteraan masyarakat. Estimasi dilakukan dengan bantuan software e-views12 dengan menggunakan signifikansi sebesar 0,05 atau 5%.

Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Y = Kesejahteraan

β_0 = Konstanta

X1 = Pertumbuhan Ekonomi

X2 = Upah Minimum Provinsi

β = Koefisien

ε = Error term

3. Estimasi Model Regresi Data Panel

Adapun penentu model estimasi dalam model regresi yaitu dengan menggunakan data panel yang dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:

a. *Common Effect Model (CEM)*

Common Effect Model merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat kecil untuk mengestimasi model dan panel.

b. *Fixed Effect Model (FEM)*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antara individu dapat diakomodasikan dari perbedaan intersepnya. Model *fixed effect* adalah teknik estimasi data panel menggunakan variabel *dummy* untuk mendeteksi perbedaan intersep. *Intercept* antar perusahaan, perbedaan

intersep dapat muncul karena perbedaan budaya kerja, manajemen dan perawatan intensif. Selain itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi ditetapkan antara perusahaan dan waktu.

c. *Random Effect Model (REM)*

Model ini memperkirakan data panel di mana variabel gangguan mungkin terkait dari waktu ke waktu dan antar individu. Dalam model efek acak, perbedaan intersep diperhitungkan oleh kondisi kesalahan masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model efek acak adalah bahwa heteroskedastisitas dihilangkan. Model ini juga dikenal dengan teknologi GLS (*Generalized Least Square*).

4. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk menganalisis data panel, perlu dilakukan pengujian spesifikasi model yang benar untuk mendeskripsikan data mana yang paling baik dan paling cocok, untuk memilih model mana yang paling cocok maka akan dilakukan pengujian, yaitu Uji Chow dan Uji Hausman. Adapun uji yang dimaksud yaitu:

a. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan fixed effect lebih baik daripada model regresi data panel common effect dengan melihat residual sum squares. Nilai uji chow yang didapat kemudian dibandingkan dengan F-tabel pada numerator sebesar $N-1$ dan denominator $NT-N-K$. nilai F-tabel menggunakan α sebesar 1% dan 5%. Perbandingan tersebut dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = menerima model *common effect*, jika nilai Chow < F-tabel

H_1 = menerima model *fixed effect*, jika nilai Chow > F-tabel

b. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk membandingkan apakah fixed effect model atau *random effect* model yang lebih sesuai. H_0 dari uji Hausman yaitu *random effect* dan sedangkan H_1 yaitu *fixed effect*. Statistik uji Hausman mengikuti distribusi Chi Square dengan degree of

freedom sebanyak jumlah variabel bebas dari model. Jika nilai statistik Hausman lebih besar daripada nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model fixed effect dan sebaliknya.

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan model pendekatan *Common Effect Model* (CEM) lebih baik dari model Random Effect Model (REM) dalam mengestimasi data panel. Random Effect Model dikembangkan oleh Breusch-Pagan yang digunakan untuk menguji signifikansi yang didasarkan pada nilai residual dari metode OLS.

Dasar pengambilan keputusan (Gujarati Damodar; Dawn C. Porter 2012) adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai cross section Breusch-Pagan > nilai signifikan 0,05 maka H_0 diterima, sehingga model Common Effect Model (CEM) adalah yang paling tepat untuk digunakan.
- 2) Jika nilai cross section Breusch-Pagan < nilai signifikan 0,05 maka H_0 ditolak, sehingga model Random Effect Model (REM) adalah yang paling tepat untuk digunakan.

Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 = Common Effect Model (CEM)

H_1 = Random Effect Model (REM)

5. Uji Hipotesis

a. Uji-t Parsial (Probabilitas Uji-t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel (Gujarati, 2003). Jika nilai Probability < derajat kepercayaan yang ditentukan sebesar 5% dan jika nilai t hitung lebih tinggi dari t tabel maka suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependennya. Hipotesis uji t sebagai berikut:

- 1) Probabilitas Pertumbuhan Ekonomi < derajat kepercayaan 5%, maka adanya pengaruh yang positif secara parsial antara pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat
- 2) Probabilitas upah minimum provinsi derajat kepercayaan 5%, maka adanya pengaruh yang negatif antara upah minimum terhadap kesejahteraan masyarakat

b. Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen (Gujarati, 2003). Jika nilai Probability < derajat kepercayaan yang ditentukan dan nilai F hitung lebih tinggi dari t tabel maka suatu variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya. Perumusan hipotesisnya adalah: Dengan tingkat signifikan 5%, jika nilai F hitung < F tabel maka H_0 diterima dan nilai F hitung > F tabel H_0 ditolak.

- 1) Jika nilai probabilitas F-hitung derajat kepercayaan 5% maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- 2) Jika nilai F-hitung derajat kepercayaan 5% maka H_0 variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R) dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yaitu angka pertumbuhan ekonomi (X1), upah minimum provinsi (X2) terhadap variabel dependen yaitu kesejahteraan masyarakat (Y).

Fit R-Square menentukan ada tidaknya hubungan yang berpengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nilai Adjust R-Squared dapat ditingkatkan atau diturunkan sebagai variabel independen ditambahkan ke model. Nilai koefisien determinasi yang biasanya diberi simbol r^2 menunjukkan hubungan antara pengaruh dua variabel yaitu variabel X (sebagai variabel bebas) dan variabel Y (sebagai variabel terikat), dari hasil perhitungan tertentu. Sedangkan

R^2 digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara tiga variabel atau lebih.

Besarnya koefisien determinasi (R^2) adalah 0 berbanding 1. Semakin dekat koefisien determinasi (R^2) dari suatu persamaan regresi ke 1, maka semakin besar pengaruh semua pengaruh independen terhadap variabel dependen (semakin besar kemampuan model yang dihasilkan Untuk menjelaskan perubahan nilai variabel dependen). Sebaliknya, semakin dekat koefisien determinasi atau persamaan regresi ke 0, maka semakin kecil pengaruh ketergantungan terhadap nilai variabel independen (semakin kecil kemampuan model yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

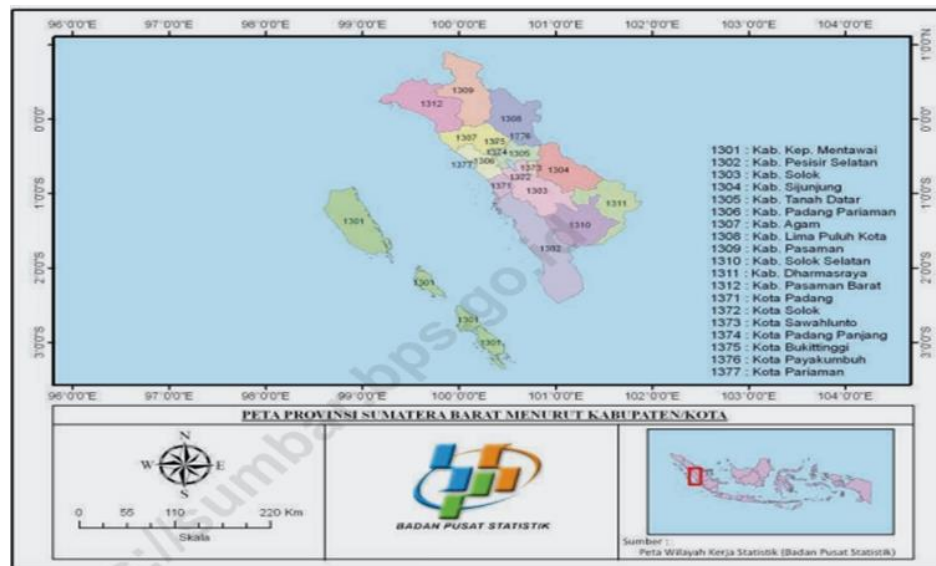
A. Temuan Penelitian

1. Luas dan Batas Administrasi

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang ada di negara kesatuan republik Indonesia dan juga dikenal oleh orang banyak dengan sebutan "Ranah Minang". Provinsi Sumatera Barat memiliki luas wilayah sekitar 42.119,54 km² atau setara dengan 16.263,65 mil persegi.

Wilayahnya mencakup bagian daratan dan perairan dengan karakteristik geografis yang bervariasi, termasuk dataran tinggi, dataran rendah, pantai, danau, lembah serta pantai dengan beberapa pulau kecil. Wilayah ini mempunyai jumlah penduduk sekitar sebanyak 4.846.909 jiwa dengan mayoritas memiliki kepercayaan spiritual islam (BPS, 2024).

Gambar 4. 1
Peta Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota yang memiliki luas dan potensi wilayah masing-masing yang berbeda. Kabupaten terdiri dari Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang

Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan kota terdiri dari Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, Kota Solok, dan Kota Padang Panjang (BPS, 2024).

Tabel 4. 1
Luas Wilayah Menurut Kabupaten dan Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Luas Area (Km ²)
1	Kab. Kep.Mentawai	5.982,22
2	Kab. Pesisir Selatan	6.045,65
3	Kab. Solok	3.590,40
4	Kab. Sijunjung	3.150,58
5	Kab. Tanah Datar	1.337,19
6	Kab. Padang Pariaman	1.342,27
7	Kab. Agam	2.226,27
8	Kab. Lima Puluh Kota	3.273,41
9	Kab. Pasaman	3.902,44
10	Kab. Solok Selatan	3.282,14
11	Kab. Dharmasraya	2.920,93
12	Kab. Pasaman Barat	3.852,99
13	Kota Padang	694,34
14	Kota Solok	58,72
15	Kota Sawahlunto	231,95
16	Kota Padang Panjang	23,56
17	Kota Bukittinggi	24,17
18	Kota Payakumbuh	74,55
19	Kota Pariaman	64,77
Sumatera Barat		42.119,54

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

2. Batas Administrasi

Berdasarkan letak geografis Provinsi Sumatera Barat berbatasan dengan:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Riau dan sebagian dengan Provinsi Jambi. Di bagian timur ini Provinsi Sumatera Barat terdiri banyak hutan hujan tropis dan beberapa sungai besar.
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, di wilayah perbatasan ini meliputi wilayah daratan seperti pegunungan dan hutan.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Pantai barat Provinsi Sumatera Barat ini memanjang dari utara hingga ke selatan, dan terdapat pulau-pulau kecil seperti Kepulauan Mentawai.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan sebagian Jambi. Di bagian selatan ini terdiri dari dataran rendah serta sebagiannya hutan dan perbukitan (BPS, 2024)

B. Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah suatu jenis statistik yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), minimum, maksimum serta standar deviasi merupakan ukuran yang berguna untuk melihat apakah variabel terdistribusi normal atau tidak.

Dalam penelitian ini variabel dependen (Y) adalah Kesejahteraan Masyarakat sedangkan variabel independennya (X) adalah Pertumbuhan Ekonomi (X1) dan Upah Minimum (X2)

Tabel 4. 2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Nilai Rata-Rata (Mean)	Standar Deviasi	N
Kesejahteraan Masyarakat (IPM)	67,65	83,99	75,073	5,59684	30
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	-1,86	6,41	4,243	2,044694	30
Upah Minimum (Upah minimum Provinsi)	1.615.000	2.811.449	2.280.784	400129.699	30

Sumber: Hasil Output Eviews12, data diolah

Pada analisis statistik deskriptif pada tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa 30 jumlah data pada tiap-tiap variabel yang diteliti. Pada data variabel kesejahteraan masyarakat (IPM) menunjukkan bahwa data minimum 67,65 yang dialami Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2015. Sedangkan data maksimumnya 83,99 yang dialami Kota Padang tahun 2024. Nilai rata-rata (*mean*) Kesejahteraan Masyarakat (IPM) sebesar 75,073 dengan nilai standar deviasi sebesar 5,59684, dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai mean lebih besar dari standar deviasi maka data Kesejahteraan masyarakat dikatakan kurang bervariasi.

Pada analisis statistik deskriptif pada tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa 30 jumlah data pada tiap-tiap variabel yang diteliti. Pada data variabel Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan bahwa data minimum -1,86 yang dialami Kota Padang pada tahun 2020. Sedangkan data maksimumnya 6,41 yang dialami Kota Padang pada tahun 2015. Nilai rata-rata (*mean*) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,243 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,044694, dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai mean lebih besar dari standar deviasi maka data pertumbuhan ekonomi dikatakan kurang bervariasi.

Pada analisis statistik deskriptif pada tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa 40 jumlah data pada tiap-tiap variabel yang diteliti. Pada data variabel upah minimum (upah minimum provinsi) menunjukkan bahwa data minimum 1.615.000 yang dialami setiap kabupaten/kota pada tahun 2015. Sedangkan

data maksimumnya 2.811.449 yang dialami setiap kabupaten/kota pada tahun 2024. Nilai rata-rata (*mean*) upah minimum (upah minimum provinsi) sebesar 2.280.784 dengan nilai standar deviasi sebesar 400129.699 dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai mean lebih kecil dari standar deviasi maka data upah minimum provinsi (UMP) dapat dikatakan bervariasi.

C. Analisis Data

1. Analisis Regresi Data Panel

Regresi data panel memiliki gabungan karakteristik yaitu data yang terdiri atas beberapa objek dan meliputi waktu. Data semacam ini memiliki keunggulan terutama karena bersifat robust (kuat) terhadap beberapa tipe pelanggaran yakni heterokedastisitas dan normalitas.

Regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga model yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan model tergantung pada asumsi yang dipakai peneliti dan pemenuhan syarat-syarat pengolahan data statistik yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. Oleh karena itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih model dari ketiga yang tersedia.

a. *Common Effect Model* (CEM)

Langkah pertama dilakukan pengolahan data menggunakan pendekatan *Common Effect Model* (CEM) secara sederhana dengan data *time series*, kemudian mengestimasi model dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil pengolahan menggunakan *Common Effect Model* yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Hasil Regresi Data Panel *Common Effect Model* (CEM)

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	2.121618	1.295174	1.638095	0.1130
PE	0.005289	0.007548	0.700751	0.4895
UM	0.001485	0.000875	1.696922	0.1012
<i>R-Squared</i>	0.096739			
<i>Adjusted R-Squared</i>	0.029831			
F-Statistic	1.445851			
Signifikansi (F- Statistik)	0.253208			

Sumber: Hasil Output E-Views12, data diolah

Berdasarkan hasil regresi dengan *Common Effect Model* (CEM) menunjukkan bahwa terdapat nilai Konstanta sebesar 2.121618 dengan probabilitas 0.1130, persamaan regresi pada nilai Adjusted R^2 sebesar 0.029831 menjelaskan bahwa variasi kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum sebesar 29,83% dan sisanya 70,17% di luar penelitian.

b. *Fixed Effect Model* (FEM)

Mengestimasi data panel model fixed effect menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian, sloponya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable* (Agus Tri Basuki 2016). Hasil pengolahan menggunakan *Fixed Effect Model* yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Hasil Regresi Data Panel *Fixed Effect Model* (FEM)

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	2.529251	0.185903	13.60521	0.0000
PE	0.000435	0.001091	0.398924	0. 6933
UM	0.001220	0.000126	9.716975	0.0000
<i>R-Squared</i>	0.982848			
<i>Adjusted R-Squared</i>	0.980103			
F-Statistic	358.1292			
Siginifikansi (F- Statistik)	0.000000			

Sumber: Hasil Output E-Views12, data diolah

Berdasarkan hasil regresi dengan *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan bahwa terdapat nilai Konstanta sebesar 2.529251 dengan probabilitas sebesar 0.0000, persamaan regresi pada nilai Adjusted R² sangat tinggi sebesar 0.980103 menjelaskan bahwa variasi Kesejahteraan Masyarakat dipengaruhi oleh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum sebesar 98% dan sisanya 2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian atau fakto-rfaktor di luar model yang sedang dianalisis.

c. *Random Effect Model* (REM)

Random Effect Model adalah metode yang akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan (residual) mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu (entitas). Model ini berasumsi bahwa error termakan selalu ada dan mungkin berkorelasi sepanjang *time series* dan *cross section*. Pendekatan yang dipakai adalah metode *Generalized Least Square* (GLS) sebagai teknik estimasinya (Agus Tri Basuki 2016). Hasil pengolahan menggunakan *Random Effect Model* yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 5
Hasil Regresi Data Panel Random Effect Model (REM)

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	2.527481	0.188277	13.42428	0.0000
PE	0.000456	0.001091	0.418258	0.6791
UM	0.001221	0.000126	9.726215	0.0000
<i>R-Squared</i>	0.793063			
<i>Adjusted R-Squared</i>	0.777735			
F-Statistic	51.73737			
Siginifikansi (F- Statistik)	0.000000			

Sumber: Hasil Output E-Views12, data diolah

Berdasarkan hasil regresi dengan *Random Effect Model* (REM) menunjukkan bahwa terdapat nilai Konstanta sebesar 2.527481 dengan probabilitas sebesar 0.0000, persamaan regresi pada nilai Adjusted R² sangat tinggi sebesar 0.777735 menjelaskan bahwa variasi Kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum sebesar 77% dan sisanya 23% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

2. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Berdasarkan ketiga model estimasi regresi data panel diatas maka akan dipilih model mana yang paling tepat untuk mengestimasi model persamaan regresi yang diinginkan dengan uji chow, uji hausman dan uji lagrange multiplier (Prawoto, 2016) sebagai berikut

a. Uji Chow

Uji chow digunakan untuk mengetahui model mana yang lebih baik antara Common Effect dan Fixed Effect.

Hipotesis pada uji chow adalah sebagai berikut:

H_0 : Common Effect Model

H_a : Fixed Effect Model

Kriteria:

Jika nilai Sig > 0.05 maka H_0 diterima

Jika nilai Sig < 0,05 maka H_a diterima

Tabel 4. 6
Hasil Uji Chow

Effect Test	Signifikansi
Cross-Section F	0.0000
Cross-Section Chi-square	0.0000

Sumber: Hasil Output E-Views12, data diolah

Berdasarkan Uji *Chow* yang ditunjukkan pada tabel 4.6 di atas diperoleh nilai Signifikansi dari *Cross-section Chi-square* dan *Cross-section f* sebesar $0.0000 < 0.05$, sehingga secara statistik H_0 ditolak dan H_a diterima, maka model estimasi yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*.

Karena hasil uji chow menunjukkan hasil model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*, maka dilakukan uji hausman untuk menguji model yang lebih tepat digunakan antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Sebelum dilakukan uji hausman, maka dilakukan terlebih dahulu regresi *Random Effect Model*.

b. Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk mengetahui model mana yang lebih baik antara *Random Effect Model* dan *Fixed Effect Model*.

Hipotesis pada uji hausman adalah sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model*

Kriteria:

Jika nilai sig > 0.05 maka H_0 diterima

Jika nilai Sig < 0.05 maka H_a diterima

Tabel 4. 7
Uji Hausman

Test Summary	Signifikansi
Cross-Section Random	1.0000

Sumber: Hasil Output E-Views12, data diolah

Berdasarkan uji hausman yang ditunjukkan pada tabel 4.7 diatas, diperoleh nilai Signifikansi dari *Cross- section random* sebesar $1.0000 > 0.05$ sehingga secara statistik H_0 diterima dan H_a ditolak,

maka model estimasi yang terpilih pada regresi data panel adalah *Random Effect Model*.

b. Uji *Langrange Multiplier*

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk mengetahui model mana yang lebih baik antara *Random Effect Model* dan *Common Effect Model*.

Hipotesis pada Uji Lagrange Multiplier adalah sebagai berikut:

H_0 : Common Effect Model

H_a : Random Effect Model

Kriteria:

Jika nilai sig > 0.05 maka H_0 diterima

Jika nilai Sig < 0.05 maka H_a diterima

Tabel 4. 8
Hasil Uji Langrange Multiplier

	Cross Section
Breusch-Pagan	124.9871
	0.0000

Sumber: Hasil Ouput E-Views12, data diolah

Berdasarkan Uji Lagrange Multiplier yang ditunjukkan pada tabel 4.8 diatas, diperoleh nilai Signifikansi dari *Cross- section Common* sebesar $0.000 < 0.05$ sehingga secara statistik H_0 diterima dan H_a ditolak, maka model estimasi yang digunakan pada regresi data panel adalah *Random Effect Model*.

3. Uji Asumsi Klasik

Gujarati & Porter (2015) menyatakan bahwa metode estimasi model pengaruh acak (Random Effect) panel menggunakan metode Generalized Least Square (GLS). Apabila berdasarkan pemilihan metode estimasi yang sesuai untuk persamaan regresi adalah *Random effect* (GLS), maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Sebaliknya, apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan *common effect* atau *fixed effect* (OLS) maka perlu dilakukan uji asmsi klasik.

4. Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil uji chow, uji hausman dan uji Lagrange Multiplier, model regresi data panel yang tepat digunakan untuk dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model*. Hasil regresi menggunakan *Random Effect Model* adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 9
Hasil Regresi Data Panel Random Effect Model (REM)

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	2.527481	0.188277	13.42428	0.0000
PE	0.000456	0.001091	0.418258	0.6791
UM	0.001221	0.000126	9.726215	0.0000
<i>R-Squared</i>	0.793063			
<i>Adjusted R-Squared</i>	0.777735			
F-Statistic	51.73737			
Signifikansi (F-Statistic)	0.000000			

Berdasarkan hasil regresi Random Effect Model yang ditunjukkan pada tabel diatas, maka diperoleh hasil persamaan model regresi antara variabel dependen (Kesejahteraan Masyarakat), dan variabel independent (pertumbuhan ekonomi dan upah minimum) sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

$$Y = 2.527481\beta_0 + 0.000456X_1 + 0.001221X_2 + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa:

Nilai konstanta sebesar 2.527481 artinya jika variabel Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (X1) dan Upah Minimum (X2) tetap, maka variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) akan mengalami Peningkatan sebesar 2.527481 poin.

Nilai koefisien beta variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) sebesar 0.000456 hal ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (X1) memiliki hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2024. Artinya setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi (X1) sebesar 1% maka variabel Kesejahteraan masyarakat (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.000456 poin .

Nilai koefisien variabel upah minimum (X2) sebesar 0.00122, hal ini menunjukkan bahwa variabel upah minimum (X2) memiliki hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2024. Artinya setiap kenaikan upah minimum (X2) sebesar 1% maka variabel Kesejahteraan masyarakat (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.00122 poin.

5. Pengujian Hipotesis

a. Hasil Uji T (Parsial)

Uji t merupakan uji parsial yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi (X1) dan upah minimum (X2) terhadap variabel Kesejahteraan masyarakat (Y). Kriteria uji t yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya ada pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
- 2) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Uji regresi secara parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi (X1) dan upah minimum (X2) berpengaruh terhadap variabel Kesejahteraan masyarakat (Y). Sebelum diketahui bahwa hasil uji hipotesis diterima atau ditolak maka tentukan t_{tabel} dengan signifikansi 5% (0.05) dengan uji satu arah dan $df = n-k-1$ atau $d = 30-2-1 = 27$ diperoleh t_{tabel} sebesar 1.703.

Dimana tabel uji parsial sebagai berikut:

Tabel 4. 10
Hasil Uji Parsial (Uji T)

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	2.527481	0.188277	13.42428	0.0000
X1	0.000456	0.001091	0.418258	0.6791
X2	0.001221	0.000126	9.726215	0.0000

Sumber: Hasil Output E-Views12, data diolah

Berdasarkan uji hasil signifikansi uji parsial (Uji t) pada variabel pertumbuhan ekonomi t_{hitung} sebesar 0.418258 yang artinya lebih besar dari t_{tabel} ($0.418258 < 1.703$), dan signifikansi 0. 6791 lebih besar dari 0.05 ($0. 6791 > 0.05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat.

Untuk upah minimum sebesar t_{hitung} 9.726215 yang artinya lebih kecil dari t_{tabel} ($9.726215 < 1.703$), sedangkan untuk upah minimum nilai signifikannya sebesar 0.0000 yang artinya kecil dari 0.05 ($0.0000 < 0.05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya ada pengaruh signifikan antara variabel upah minimum dengan Kesejahteraan masyarakat.

b. Hasil Uji F (Simultan)

Uji F merupakan uji secara simultan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi (X1) dan upah minimum (X2) dengan Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat secara bersama digunakan alat analisis yaitu uji F (F-test). Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0.05 dengan hasil uji satu arah dengan derajat keabsahan $df = n-k-1$, $df=30-2-1=27$ dapat diperoleh F_{tabel} sebesar 3.354. Dimana kriteria pengambilan keputusan dalam uji F ini yaitu:

- 1) Apabila nilai probabilitas $F_{hitung} \geq 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya secara bersama-sama variabel (X1) pertumbuhan

ekonomi, dan (X2) upah minimum tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan masyarakat (Y).

- 2) Apabila nilai probabilitas $F_{hitung} \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara bersama-sama variabel variabel (X1) pertumbuhan ekonomi, dan (X2) upah minimum berpengaruh terhadap Kesejahteraan masyarakat (Y).

Tabel 4. 11
Hasil Uji Simultan (Uji F)

F-statistic	51.73737
Prob (F-statistic)	0.000000

Sumber: Hasil Output E-Views12, data diolah

Berdasarkan hasil uji diperoleh untuk F_{hitung} sebesar 51.73737 dan diketahui f_{tabel} sebesar 3.354 ($51.73737 > 3.354$) dengan signifikan yang diperoleh sebesar 0.000000 atau kurang dari 0.05 ($0.000000 < 0.05$) maka dalam hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan masyarakat.

c. Uji Koefisien Determinasi (R-Squared)

Uji R-Squared ditujukan untuk menilai seberapa besar kemampuan variabel Independen menjelaskan variabel Dependen yang dilihat dari Adjusted R-Squared.

Tabel 4. 12
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R-Squared)

<i>R-Squared</i>	0.793063
<i>Adjusted R-Squared</i>	0.777735

Sumber: Hasil Output E-Views12, data diolah

Berdasarkan hasil regresi dengan *Random Effect Model*, diketahui bahwa nilai *R-Squared* sebesar 0.793063. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi dan upah minimum mampu meningkatkan variabel Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera

Barat sebesar 79%, sedangkan sisanya yaitu 21% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi 2015-2024

Berdasarkan uji hasil signifikansi uji parsial (Uji t) pada variabel pertumbuhan ekonomi t_{hitung} sebesar 0.418258 yang artinya lebih besar dari t_{tabel} ($0.418258 < 1.703$), dan signifikansi 0.6791 lebih besar dari 0.05 ($0.6791 > 0.05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa untuk variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan masyarakat. Pengaruh pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Hal ini tidak sejalan dengan teori kesejahteraan menurut Arthur C. Pigou (dalam Agung, 2014), kesejahteraan masyarakat akan dapat meningkat apabila pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak pada kesejahteraan masyarakat, meskipun pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan dan akses ke layanan dasar, faktor-faktor lain seperti ketimpangan distribusi pendapatan yang tidak merata, akses yang terbatas ke layanan kesehatan berkualitas, dan masalah lingkungan dapat menjadi faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi.

Di Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi banyak ditopang oleh sektor-sektor seperti sektor pertanian, perdagangan namun tidak semua sektor memberikan lapangan kerja yang luas atau peningkatan pendapatan langsung bagi masyarakat dengan keadaan ekonomi rendah (miskin), serta pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar seperti

Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh sementara daerah-daerah lain masih tertinggal baik secara infrastruktur maupun akses ekonomi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuli Fatmawati yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Miskin, dan Dana Bantuan Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Semarang” dimana hasilnya pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Tingkat Pengangguran terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Timur Tahun 2014-2018, Shella Okky Shavira, Mohammad Balafif, 2021. Hasil penelitian ini dengan H_1 diterima yaitu variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Sumatera Barat 2015-2024

Untuk upah minimum sebesar t_{hitung} 9.726215 yang artinya lebih kecil dari t_{tabel} ($9.726215 < 1.703$), sedangkan untuk upah minimum nilai signifikannya sebesar 0.0000 yang artinya kecil dari 0.05 ($0.0000 < 0.05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya ada pengaruh signifikan antara variabel upah minimum dengan Kesejahteraan masyarakat..

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji T) menunjukkan bahwa untuk variabel upah minimum berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan masyarakat. Pengaruh upah minimum berpengaruh terhadap Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Temuan ini menegaskan bahwa kenaikan standar upah meningkatkan kemampuan rumah tangga pekerja dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan dan pendidikan sehingga mendorong perbaikan IPM. Kekuatan pengaruh lebih nyata di Kota Padang yang memiliki tingkat kepatuhan dan sektor formal lebih besar, sementara di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Tanah Datar dampaknya relatif lebih kecil seiring tingginya porsi tenaga kerja informal.

Penelitian ini mendukung teori Menurut John Maynard Keynes dan James S. Duesenberry teori pendapatan absolut vs. relatif. Upah minimum yang lebih tinggi dapat meningkatkan pendapatan absolut pekerja, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia, Dwi Kasiyati Durrotun Ni'mah, 2024” dan penelitian relevan lainnya seperti penelitian oleh Kadek Bagus Siwa, dkk, serta penelitian I Gede Allen Sanjaya, dkk, dimana penelitian yang sudah ada ini juga memperoleh hasil bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2024.

Berdasarkan hasil uji diperoleh untuk F_{hitung} sebesar 51.73737 dan diketahui f_{tabel} sebesar 3.354 ($51.73737 > 3.354$) dengan signifikan yang diperoleh sebesar 0.000000 atau kurang dari 0.05 ($0.000000 < 0.05$) maka dalam hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil regresi dengan *Random Effect Model*, diketahui bahwa nilai R-Squared sebesar 0.793063. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Independen yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum mampu meningkatkan variabel Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat sebesar 79%, sedangkan sisanya yaitu 21% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Hasil simultan penelitian ini bisa terjadi dikarenakan pertumbuhan ekonomi mungkin hanya dinikmati kelompok tertentu saja, namun dengan

disertai dengan peningkatan upah minimum, maka efeknya mulai dirasakan oleh kelompok pekerja.

Sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa ada hubungan dua arah (sebab-akibat ganda) antara Kesejahteraan Masyarakat dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum dimana Kesejahteraan Masyarakat mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan upah minimum serta sebaliknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian serta hasil analisis yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2024. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 0.418258 yang artinya lebih kecil dari t_{tabel} ($0.418258 < 1.703$) dan signifikansi 0.6791 lebih besar dari 0.05 ($0.6791 > 0.05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
2. Upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2024. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t_{hitung} 9.726215 yang artinya lebih besar dari t_{tabel} ($9.726215 > 1.073$) dan untuk signifikansi upah minimum nilai signifikansinya sebesar 0.0000 yang artinya kecil dari 0.05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
3. Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2024. Hal ini dibuktikan dengan nilai F_{hitung} sebesar 51.73737 dan diketahui F_{tabel} sebesar 3.354 ($51.73737 > 3.354$) dengan signifikansi yang diperoleh sebesar 0.00000 yang berarti kurang dari 0.05, maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ada di atas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah Sumatera Barat sebaiknya tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi secara agregat, tetapi juga memastikan pertumbuhan yang inklusif (melibatkan banyak aspek supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat) sehingga mampu menurunkan ketimpangan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah. Selanjutnya mengenai distribusi pendapatan perlu diarahkan pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap masyarakat seperti pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar manfaat benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara luas.
2. Bagi pemerintah daerah, perlu dilakukan kembali peninjauan mengenai mekanisme penetapan upah minimum provinsi perlu dilakukan oleh pemerintah Sumatera Barat dengan memperhatikan bagaimana kebutuhan hidup layak masyarakat serta kondisi ekonomi daerahnya agar lebih mencerminkan realitas pengeluaran masyarakat.

Menetapkan kebijakan upah minimum yang realistis sesuai kondisi daerah sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat tanpa menurunkan daya saing tenaga kerja maupun menghambat investasi.

Terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan agar IPM semakin meningkat dan berkontribusi pada kesejahteraan jangka panjang.

3. Untuk peneliti selanjutnya yang menggunakan topik serupa, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dengan memasukkan variabel independen tambahan yang mungkin berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan metode analisis yang berbeda, misalnya *panel dynamic regression* atau *error correction model*,

guna untuk melihat hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, Data dapat diperluas tidak hanya di tiga kabupaten/kota, tetapi juga mencakup seluruh wilayah di Sumatera Barat atau bahkan antar provinsi untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh dan menggunakan metode analisis lain (misalnya regresi panel dengan efek acak/efek tetap, atau model dinamis) agar hasil penelitian lebih robust (tahan uji).

4. Bagi masyarakat, Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan peningkatan ekonomi dan kebijakan pemerintah secara optimal. Misalnya, dengan meningkatkan keterampilan kerja, mengikuti pelatihan, serta berperan aktif dalam mendukung program pembangunan daerah. Dengan demikian, peningkatan IPM tidak hanya bersifat angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan melalui peningkatan kualitas hidup sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. (2011). *Ihya Ulum Al-Din* (Terj. Ismail Yakub). Jakarta: Republika.
- Amirul, Z. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, PDRB Perkapita dan Upah Minimum Human Development Index Studi Kasus 12 Provinsi Dengan Kategori Lower Medium di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 91-119.
- Anshar, K. (2023). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Dunia dan Indonesia*. Malang: UB Press.
- Anshori M, S. I. (2017). *Metodologi Penelitian*. Surabaya: Airlangga University Pers.
- Assidiq, R. (2017). Peran Negara untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Rangka Maqashidus Syariah. *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*.
- Badan Pusat Statistik. (2017).
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Luas Wilayah Kabupaten Kota Provinsi*. Diakses pada 15 Juli 2025, dari <https://www.bps.go.id/>
- BAPPENAS 2020. (n.d.).
- Bdk, J. S. (2020). *Utilitarianisme (terjemahan oleh Artika Sari)*. Yogyakarta: Basabasi.
- Blanchard, O., & Jhonsen, D.R. (2017) *Macroeconomic* (7th Ed). Pearson.
- Calicchio, S. (2023). *Abraham Maslow, dari Hierarki Kebutuhan Hingga Pemenuhan Diri*.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000). *The Muslim World and the Future Economic Order/ Islam dan Tantangan Ekonomi (versi terjemahan)*. Depok: Gema Insani.
- Duli, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Beberapa Konsep Dasar untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Deepublish.

- EgDOBanya, A. (2013). Revenue Generation: Impact on Government Development Effort (A Study of Selected Local Council in Kogi East Senatorial District). *global journal of management and business research*.
- Ekasari, R. (2020). *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. Malang: AE Publishing.
- Erliza Millenia Putri, D. Z. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 108.
- Fadilah, N. (2020). Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 49-67.
- Greve, B. (2021). *Welfare States In A Turbulent Era*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
- Gubernur, s. k. (2020). Keputusan Gubernur Sumatera Barat. *Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020*. Sumatera Barat, Indonesia.
- Gujarati Damodar; Dawn C. Porter. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika* (Buku 2 Edisi 5 (ed.)). Salemba Empat.
- Gujarati Damodar; Dawn C. Porter. (2015). *Dasar-dasar ekonometrika = Basic econometrics*. Salemba Empat.
- Gunawan, R. (2025). *Hubungan Industrial dan Hukum Perburuhan*. Padang: Takaza Innovatix Labs.
- Gusfahmi. (2007). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, I. M. (2017). *Pokok-Pokok Materi Statistik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hausman, D. M. (1992). *Essays On Philosophy and Economic Methodology*. New York: Press Syndicate Of the University of Cambridge.
- Hewi Susanti, d. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Aceh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Prov Aceh Setelah Tsunami. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 3.
- Indra Riko Rosandi, M. J. (2017). Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Studi Kasus

- Penerapan Upah Minimum di Kota Samarinda. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 1119-1130.
- Kahf, M. (2004). *Islamic Economic: What Went Wrong? Paper presented at Islamic Development Bank Roundtable on Islamic Economics*. Jeddah: Current State of Knowledge and Development of the Discipline.
- Karim, A. A. (2021). *Ekonomi Mikro Islam* (Edisi Ke-6). Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartasmita, P. S. (2024). *Membawa Keadilan Dan Perdamaian Ke Tanah Papua*. Bandung: Unpar Press.
- Kemenko PMK. (2024). *Ini Ragam Upaya Pemerintah untuk Tingkatkan Kesejahteraan Sosial*.
- Kiran R, S. K. (2014). impact of economic growth on employment in india. *International Journal of Innovative Jesearch in Science, Engineering and Technology*, 2319-8753.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory Of Employment, Interest And Money*. Macmillan.
- Lilis Setyowati, Y. K. (2012). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan Dana Perimbangan terhadap IPM melalui Belanja modal. *jurnal*.
- Machmud, A. (2016). *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Erlangga.
- Mankiw, N. G. (2019). *Macroeconomics* (10th Ed). Worth Publisher.
- Mardiyah, U. (2024). *Pengantar Ilmu Sosial Humaniora*. Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
- Ma'ruf, A. (2008). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospek. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 46.
- Muafiqie, M. (2023). *Pengantar Ilmu Ekonomi Pendekatan Makro dan Mikro*. Yogyakarta: Selat Media Patners.
- Mudana, I. W. (2024). Pengaruh Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Kesejahteraan

Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 9606.

Muhammad Sulaiman, A. Z. (2010). *Jejak Bisnis Rasul*. Jakarta : PT. Mizan Publika.

Ningrum, S. S. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 185.

Nur, M. (2024). *Mewujudkan Kesejahteraan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas*. Indramayu: Penerbit Adab.

Nurul Huda. (2015). *Ekonomi pembangunan Islam* (Edisi 1, C). Prenada Media.

Pambudi, E. W. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro of Journal Economic*, 2.

Pasha, M. K. (2009). *Fikih Islam Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.

Pigou, A. C. (1920). *The Economics Of Welfare*. London: Macmillan

Pustaka, D. B. (2010). *Kamus Pelajar*. Retrieved from Dewan Bahasa Dan Pustaka:
<http://prpm.dbp.gov.my/carian.aspx?cari=sejahtera&domain=PRPM>.

Qardhawi, Y. (2011). *Fiqh Al-Zakah* (Vol. 1-2). Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

Radiansyah, A. (2024). *Buku Ajar Manajemen Hubungan Industrial*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Rahman, A. (2023). *Ekonomi Demografi dan Kependudukan*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka.

Rohman, A. (2010). *Ekonomi Al-Ghazali, menelusuri konsep ekonomi islam dalam ihya ulum ad-din* . Surabaya: Bina Ilmu.

Rojot, J. (1991). *Negotiation: From Theory to Practice*. Houndmills: Macmillan Press LTD.

- Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Sabar, W. (2013). Analisis Determinan Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Enrekang tahun 2012.
- Sastrohadiwiryo, S. (2021). *Manajemen Tenaga Kerja Di indonesia*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Sayidah Fitri Alkhoiriyah, C. S. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banjarmasin. *JIEP : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press
- Skousen, M. (2015). *The Big Three In Economic's Adam Smith Karl Max and John Maynard Keynes*. New York: Routledge.
- Sodiq, a. (2016). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 380-405.
- Suhaimi, M. R. (2024). *Dinamika Riset Sosial Isu Dalam Ruang Digital, Nasional, Dan Internasional*. EDU Publisher.
- Sukirno, S. (2011). *Makroekonomi Teori Penganta*. Bogor: Rajawali Pers.
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi Teori Penganta*. Bogor: Rajawali Pers.
- Sunaryo. (2017). *Etika Berbasis Kebebasan Amatya Sen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suryana. (2013). *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat
- Syarif, M. I. (2008). *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Erlangga.
- Syayuti. (2022). *Investasi Ekonomi dan Sosial Melalui Pertumbuhan Ekonomi*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Tamsiya, M. A. (2025). *Hubungan Industrial dan Hukum Perburuhan*. Bekasi: Alung Cipta.

Todaro, M.P.,& Smith, S. C. (2015). *Economic Development*. 12th Edition.

Boston: Pearson

Todaro, M.P.,& Smith, S. C. (2020). *Economic Development*. 13th Edition.

Boston: Pearson

UNDP 2020. (n.d.).

Untoro, J. (2010). *Ekonomi*. Jakarta: Kawah Media.

UU no 11 Tahun 2009. (n.d.).

Wascher, D. N. (2010). *Minimum Wages*. The MIT Press.

Yuni, R. (2021). Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Tahun 2009-2019. *NIAGAWAN*, 62.